



**2024**

---

**LAPORAN KINERJA**  
**KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

---

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
C. Sistematika Laporan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Perencanaan Strategis.....	17
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	134
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	135
D. Kinerja Lain-Lain.....	135
BAB IV PENUTUP.....	136
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	137

# 110,13%

Nilai Kinerja Organisasi



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Medan Barat pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN merupakan instrumen penilaian kinerja dalam mencapai visi dan misi secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *balanced scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.

Rencana Strategis DJP 2020-2024 menjadi koridor yang menentukan arah dan tujuan yang jelas bagi KPP Pratama Medan Barat dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai serta menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam mencapai tugas utama, yaitu mengumpulkan penerimaan pajak. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra DJP 2020-2024 digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) untuk periode

2020-2024 berupa rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Selama tahun 2024 KPP Pratama Medan Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Medan Barat Tahun 2024 yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Medan Barat akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Medan Barat. Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Kode SS/IKU</b>	<b>Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama</b>
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada tahun 2024 KPP Pratama Medan Barat meraih capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 110,13%. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,02% dari NKO tahun 2023 yang meraih nilai 107,11%. Nilai 110,13% disokong oleh 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 31,16%, *Customer Perspective* dengan indeks capaian 20,36%, *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 29,38%, dan *Learning & Growth Perspective* dengan indeks capaian 29,23%. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan sangat baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yaitu sebanyak 20 IKU dan seluruhnya berstatus hijau. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>103,86</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,86
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,19%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,19
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,89	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,89
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>101,79</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,89
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	106,63%	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,63
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,68
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,68%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,68
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>117,51</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,81
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,61%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,61
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,72%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,38
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,03%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,03
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,14%	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,14
7	Penegakan hukum yang efektif							118,36
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,65%	Max	P/L	19,00%	36,54%	115,53
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>116,91</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,81
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	116,89	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,89
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,67	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,73
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	100,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>110,13</b>

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

Di samping itu, KPP Pratama Medan Barat meraih Peringkat Kedua Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Tahun 2024 yang dinyatakan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor KEP-177/WPJ.01/2024 tentang Penetapan Pemenang Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I tanggal 25 September 2024. KPP Pratama Medan Barat juga meraih Peringkat Kedua pada Semester I Tahun 2024 untuk kategori Kinerja Terbaik Penilaian Pengelolaan Kinerja APBN (IKPA) di Lingkungan Satker Mitra Kerja KPPN Medan II BA BUN dengan Nilai 99,72.

Akhir kata, semoga LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Medan Barat juga sebagai pendorong untuk meningkatkan kinerja KPP Pratama Medan Barat di tahun 2025.

Medan, 24 Januari 2025  
Kepala Kantor,



(Ditandatangani secara elektronik)  
Adianto Legowo



# BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Medan Barat memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut.

## A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Hal ini menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak memikul tanggung jawab yang luar biasa besar untuk dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui berbagai kebijakan dan program kerja.

Pajak merupakan pengejawantahan praktik demokrasi dengan rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya secara khusus untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, DJP baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya harus berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini, KPP Pratama Medan Barat sendiri diberikan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 2.157.645.872.897,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp 2.403.370.865.000,00.

LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai kontrol/alat uji kinerja secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi menuju terciptanya good governance. Selain itu, LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Medan Barat secara bertahap dan berkesinambungan. Penyusunan LAKIN ini juga menjadi gambaran sasaran tugas KPP Pratama Medan Barat untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp 2.407.831.307.488,00 dan capaian 100,19% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini adalah berkat dukungan Wajib Pajak yang telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, penerapan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga unit-unit vertikal, serta sinergi dan dukungan pihak-pihak lain yang terkait.

Pencapaian target penerimaan pajak nasional tahun 2024 menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Namun, hal ini tidak menjadi tantangan bagi KPP Pratama Medan Barat untuk mencapai target penerimaan pajak

yang diamanatkan. Dengan sinergi dan kerja keras dari seluruh elemen pegawai, baik dalam penggalian potensi sektor perpajakan yang strategis di wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat, manajemen restitusi yang efektif, pelayanan prima maupun aktivitas pendukung lainnya, KPP Pratama Medan Barat berhasil memitigasi segala tantangan dan hambatan terhadap capaian penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama tahun 2024 sebesar 23,58% dibandingkan tahun 2023.

## **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Sebagai pilar utama penerimaan negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dalam APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp1.921 triliun. Angka tersebut merupakan 68,56% dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp 2.802 triliun dan 83,2% dari target penerimaan perpajakan keseluruhan sebesar Rp 2.309 triliun (target tertinggi sepanjang sejarah hingga tahun 2024). Per 31 Desember 2024, target penerimaan pajak ditetapkan menjadi Rp1.913 triliun. Target penerimaan pajak hanya akan terwujud jika seluruh elemen Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Wajib Pajak menyadari akan pentingnya penerimaan pajak untuk keperluan negara sehingga kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 22, dijabarkan fungsi Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pajak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak;
- e. Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak

langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak.
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok Wajib Pajak.
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- f. Pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan.
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat.
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan.
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan.
- n. Pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak.
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan.
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Medan Barat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.403.370.865.000,00 dari total target Kantor Wilayah Sumatera Utara I yaitu sebesar Rp 27.200.053.782.000,00. Dalam rangka merealisasikan target penerimaan pajak dimaksud dilakukan berbagai upaya berupa peningkatan etika dan moral aparat dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, penyempurnaan basis data, penyusunan strategi yang tepat, peningkatan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal, serta penggunaan sistem teknologi informasi secara efektif.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan

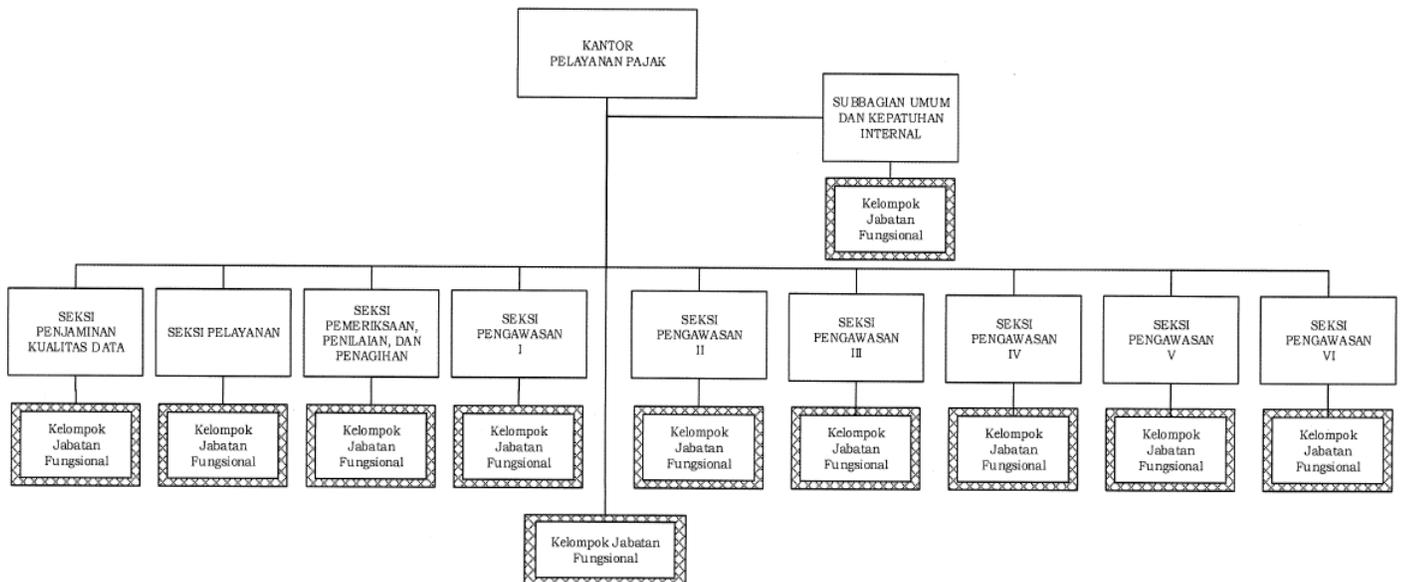
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok I yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,  
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dibawah kepemimpinan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data,  
Seksi Penjaminan Kualitas Data dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan,  
Seksi Pelayanan dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan,  
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI,  
Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pengawasan, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan

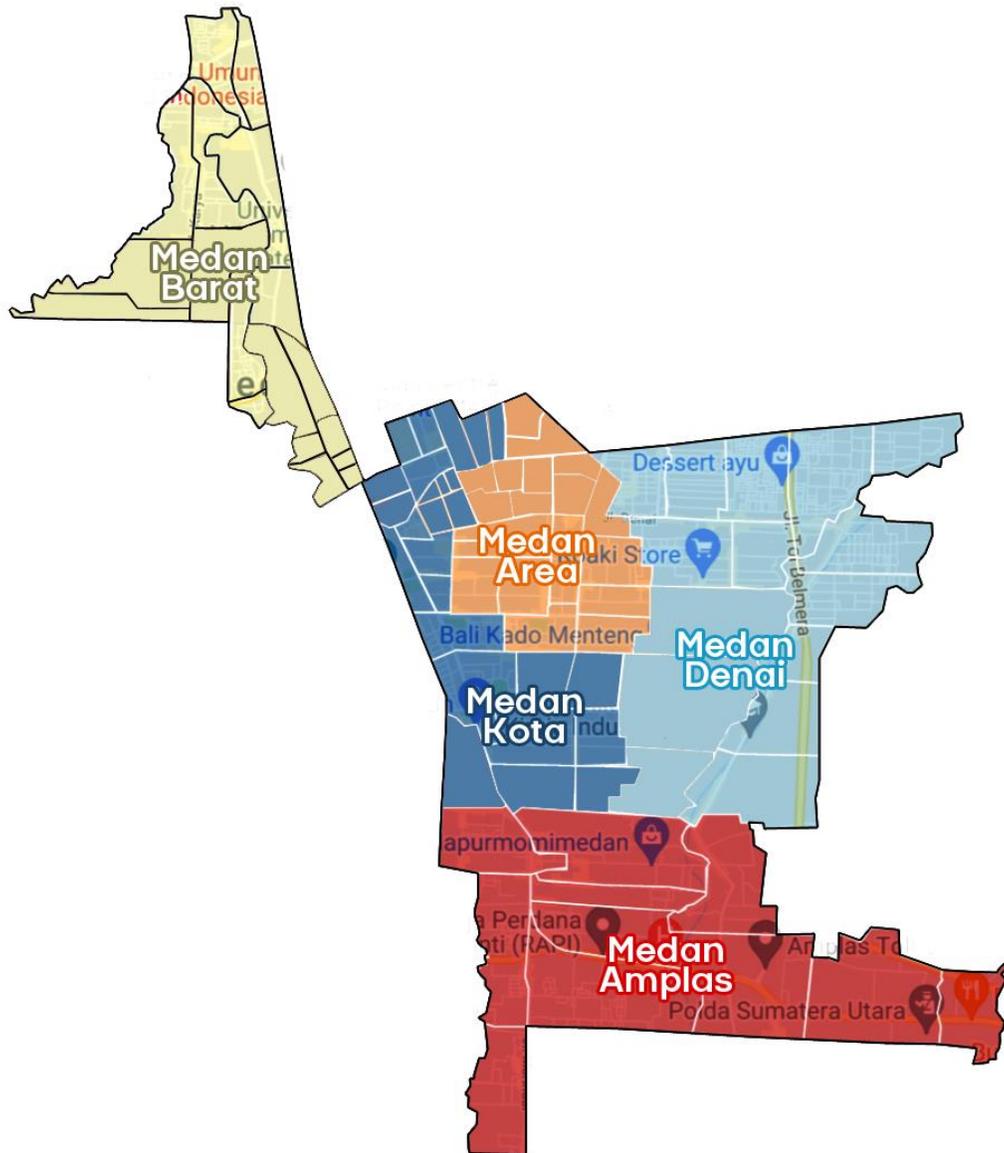
ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- f. Kelompok jabatan fungsional  
Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

**BAGAN ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)**



## PETA WILAYAH KERJA KPP PRATAMA MEDAN BARAT



### A. Peran Strategis KPP Pratama Medan Barat

Sampai dengan 31 Desember 2024 KPP Pratama Medan Barat mengadministrasikan 341.550 Wajib Pajak yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dalam wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat. KPP Pratama Medan Barat diharapkan memberikan kontribusi sekitar 8,83% dari total target penerimaan Kanwil DJP Sumatera Utara I pada tahun 2024. Sektor dominan yang menyokong penerimaan KPP Pratama Medan Barat adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 25,78%, perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 26,94%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi dengan kontribusi 11,87%.

## B. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan KPP Pratama Medan Barat sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 115 pegawai. Jumlah SDM ini juga didukung dengan adanya 35 elemen pendukung yang terdiri dari 6 pramubakti, 7 *cleaning service*, 15 satuan pengamanan (satpam), 3 teknisi, dan 4 petugas halaman dan gedung. Adapun penjelasan sumber daya manusia KPP Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut.

### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	75
2	Perempuan	40
Jumlah		115

### 2. Berdasarkan Strata/Tingkat Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Strata 2 (S2)	27
2	Strata 1(S1)/Diploma IV	64
3	Diploma III Sederajat	8
4	Diploma I Sederajat	15
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat	1
Jumlah		115

### 3. Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Pegawai
1	Islam	54
2	Katholik	4
3	Kristen Protestan	57
Jumlah		115

4. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbag	1
3	Kepala Seksi	9
4	Sekretaris	1
5	Bendaharawan	1
6	Juru Sita	2
7	Account Representative	43
8	Penyuluh Pajak Ahli Muda	1
9	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1
10	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	2
11	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	2
12	Pemeriksa Pajak Madya	2
13	Pemeriksa Pajak Muda	4
14	Pemeriksa Pajak Pelaksana	12
15	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	1
16	Pemeriksa Pajak Penyelia	1
17	Pemeriksa Pajak Pertama	1
18	Pelaksana	30
Jumlah		115

5. Berdasarkan Seksi/Bagian

No	Seksi/Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	13
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	6
4	Seksi Pelayanan	17
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	8
6	Seksi Pengawasan I	9
7	Seksi Pengawasan II	8
8	Seksi Pengawasan III	8
9	Seksi Pengawasan IV	9
10	Seksi Pengawasan V	7
11	Seksi Pengawasan VI	8
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	21
Jumlah		115

## **B. Sistematika Laporan**

Sistematika LAKIN KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **Bab I   Pendahuluan**

Bab ini berisi gambaran umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi.

### **Bab II   Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan amanat yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), prioritas nasional, serta Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. Selain itu, dijelaskan pula ringkasan atau ikhtisar Perencanaan Kinerja (PK) tahun 2024

### **Bab III  Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja organisasi berdasarkan setiap sasaran strategis, realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja organisasi, serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Selain itu, dibahas pula penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2024, hasil evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan.

### **Bab IV  Penutup**

Bab ini berisi simpulan umum mengenai capaian kinerja organisasi serta strategi dan langkah-langkah yang akan diambil di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang diturunkan ke KPP Pratama Medan Barat, sebagai berikut:

Nama IKU Pada Renstra DJP 2020-2024	Target					UIC
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Unit

Sedangkan Rencana Kerja (Renja) DJP tahun 2024 yang diturunkan ke KPP Pratama Medan Barat, sebagai berikut:

No.	Nama Indikator pada Renja DJP 2024	Target 2024	UIC
1	Persentase realisasi penerimaan negara	100	Seluruh Unit
2	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi	90	EP, PKP , Kanwil , KPP
3	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5	Seluruh Unit
4	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	KITSDA, Kanwil, KPP

Selanjutnya, Renstra dan Renja DJP tersebut diimplikasikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Medan Barat selama tahun 2020-2024, sebagai berikut:

No	Nama IKU	Renja	Rensta	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	100%	100%
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	-	-
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	-	-	100%	100%
5	Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	78	-	-	-	-
6	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	79	80	81	-
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	-	-	-	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	V	V	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	-	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	V	V	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%	*)	100%	100%	100%
10	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	V	V	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95.50%	95.50%	-	-
11	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	V	V	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100

KPP Pratama Medan Barat diharapkan memberikan kontribusi sekitar 8,83% dari total target penerimaan Kanwil DJP Sumatera Utara I pada tahun 2024. Sektor dominan yang menyokong penerimaan KPP Pratama Medan Barat adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 25,78%, perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 26,94%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi dengan kontribusi 11,87%. Sampai dengan 31 Desember 2024 KPP Pratama Medan Barat mengadministrasikan 341.550 Wajib Pajak yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dalam wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat. Dengan kondisi tersebut, KPP Pratama Medan Barat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kompeten dalam memberikan layanan prima, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu dalam mendukung pembangunan sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi (*core tax administration system*), KPP Pratama Medan Barat memberikan edukasi kepada Wajib Pajak, dengan harapan Wajib Pajak siap menggunakan sistem tersebut pada saat penerapannya.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Dalam kontrak kinerja Kepala KPP Pratama Medan Barat Tahun 2024 terdapat 10 sasaran strategis yang menjadi tolak ukur sebagai berikut.

### **1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) persentase realisasi penerimaan pajak dengan target 100% dari target angka mutlak Rp 2.403.370.865.000,00 dan (2) indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan target indeks 100.

### **2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan target 100% dari target angka mutlak Rp 2.270.385.865.000,00 dan (2) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan target 100% dari target angka mutlak 68.382 SPT.

### **3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dengan target 100% dari target angka mutlak Rp 132.985.000.000,00.

### **4. Edukasi dan pelayanan yang efektif**

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu (1) persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan target 74% dari akumulasi 25% rasio kegiatan, 30% rasio perubahan perilaku lapor, dan 45% rasio perubahan perilaku bayar dan (2) indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan target 100%.

### **5. Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif**

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase pengawasan pembayaran masa. Target IKU 90% dari penjumlahan persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak strategis dan persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dengan bobot masing-masing 50%. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis dihitung dengan bobot 40% dari persentase STP yang diterbitkan (target 961); 30% dari persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 (target 20); dan 30% dari persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan (target 24). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dihitung dengan bobot 30% dari persentase daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti (target 8.388); 40% dari persentase penambahan Wajib Pajak (dihitung dari 75% bobot kuantitas

dengan target 436,70 dan 25% target kualitas dengan target 86,4); dan 30% dari persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan (target 259).

#### 6. Pengujian Kepatuhan Material yang efektif

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama. IKU pertama adalah persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan target 100%. IKU ini dihitung dari Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan) dengan bobot masing-masing 50%. Komponen persentase P4DK WP Strategis dihitung berdasarkan capaian penelitian (bobot 40%) dan capaian tindak lanjut (bobot 60%). Komponen persentase P4DK WP Lainnya dihitung berdasarkan capaian kuantitas (bobot 40%;  $50\% \times \text{capaian LHP2DK dari DPP} + 50\% \times \text{capaian LHP2DK dari SP2DK outstanding}$ ) dan capaian kualitas (bobot 60%). IKU kedua adalah persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan target 100%. Penghitungan IKU terdiri dari 2 komponen, yaitu pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data *matching*. IKU ketiga adalah efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan target 100%. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### 7. Penegakan hukum yang efektif

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama. IKU pertama adalah tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dengan target 100% dari penjumlahan capaian 5 variabel setelah dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan. IKU kedua adalah tingkat efektivitas penagihan dengan target 75% dari 3 variabel, yaitu tindakan penagihan (bobot 50%), tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (bobot 20%), dan pencairan DSPC (bobot 30%). IKU ketiga adalah persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan target 100%.

#### 8. Data dan informasi yang berkualitas

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama. Pertama adalah IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan target 100% dari angka mutlak 4 laporan pengamatan yang dihitung dengan faktor jangka waktu dan angka mutlak 1.520 data potensi pajak berbasis lapangan yang dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang tervalidasi. Kedua adalah IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP dengan target 55% dari target angka mutlak 6 data utama regional (bobot 70%) dan 5 data regional lainnya (bobot 30%). Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.

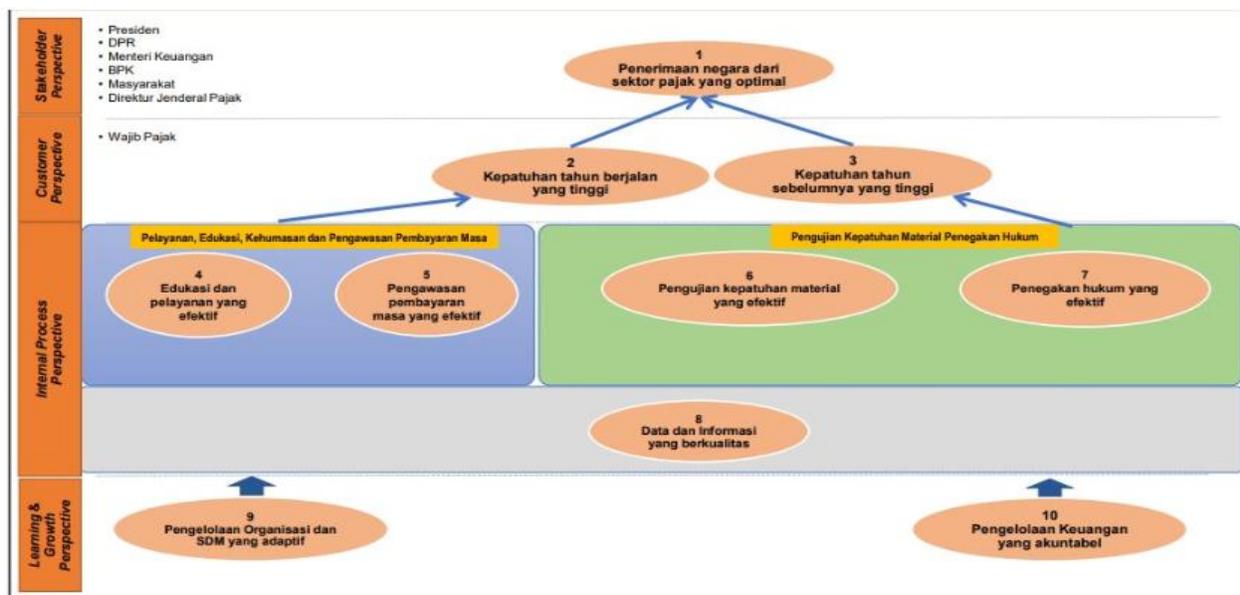
### 9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama. IKU pertama yaitu tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dengan target 100 dari skala 100 yang dihitung berdasarkan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. IKU kedua yaitu indeks penilaian integritas unit dengan target 85 dari skala 100 melalui survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak). IKU ketiga yaitu indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan target 90 dari skala 100.

### 10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama yaitu indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan target indeks 100 dengan bobot 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Berikut *mapping* dari 10 (sepuluh) peta strategi berdasarkan jenis perspektifnya:



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2024, nilai kinerja organisasi KPP Pratama Medan Barat berhasil meraih indeks capaian hijau (tingkat capaian lebih dari dan/atau sama dengan 100%) pada semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah sebanyak 20 IKU serta dalam 5 tahun terakhir nilai kinerja organisasi KPP Pratama Medan Barat selalu berada di atas 100%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi, komitmen, semangat kerja, dan peran aktif seluruh elemen di KPP Pratama Medan Barat dalam memberikan kinerja yang prima. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai pencapaian tersebut, berikut disajikan ringkasan data capaian masing-masing IKU berdasarkan sasaran strategis yang telah berhasil dicapai hingga akhir tahun anggaran 2024.

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP SUMATERA UTARA I  
KPP PRATAMA MEDAN BARAT  
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				103,86
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			103,86
<a href="#">1a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,19%	100,19
<a href="#">1b-CP</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,89	108,89
<i>Customer Perspective</i>				101,79
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			102,89
<a href="#">2a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%	100,16
<a href="#">2b-CP</a>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	106,63%	106,63
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,68
<a href="#">3a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,68%	100,68
<i>Internal Process Perspective</i>				117,51
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113,81
<a href="#">4a-CP</a>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

<a href="#">4b-N</a>	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,61%	107,61
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
<a href="#">5a-CP</a>	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,72%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			115,39
<a href="#">6a-CP</a>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
<a href="#">6b-N</a>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,03%	118,03
<a href="#">6c-N</a>	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,14%	108,14
7	Penegakan hukum yang efektif			118,36
<a href="#">7a-CP</a>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
<a href="#">7b-CP</a>	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,65%	115,53
<a href="#">7c-N</a>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
<a href="#">8a-CP</a>	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
<a href="#">8b-CP</a>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				116,91
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,81
<a href="#">9a-N</a>	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,89	116,89
<a href="#">9b-N</a>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	96,67%	113,73
<a href="#">9c-N</a>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	110,82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
<a href="#">10a-CP</a>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	100,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>110,13</b>

Untuk penyusunan LAKIN DJP KPP Pratama Medan Barat Tahun 2024 terdapat 20 IKU yang dianalisis sebagai berikut:

1. **Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	23.53%	52.09%	52.09%	68.63%	68.63%	100.19%	100.19%
Capaian	102.30%	104.18%	104.18%	91.51%	91.51%	100.19%	100.19%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c. Formula IKU

$(\text{Realisasi Penerimaan Pajak} / \text{Target Penerimaan Pajak}) \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Target Baru 2024			
<b>A Target sd Desember 2024</b>			<b>2,403,370,865,000</b>
<b>1</b>	<b>PPM</b>		<b>2,270,385,865,000</b>
<b>2</b>	<b>PKM</b>		<b>132,985,000,000</b>
	a	Edukasi	825,249,000
	b	Pengawasan & PKM Lainnya	88,576,344,000
	c	Pemeriksaan	20,590,687,000
	d	Penegakan Hukum	13,092,973,000
	e	Penagihan	9,899,747,000
<b>B Realisasi sd Desember 2024</b>			<b>2,407,831,307,488</b>
<b>1</b>	<b>PPM</b>		<b>2,273,940,034,769</b>
	a	PPM Bruto	2,307,915,348,318
	b	SPMKP	(33,975,313,549)
<b>2</b>	<b>PKM</b>		<b>133,891,272,719</b>
	a	<b>PKM Aktivitas</b>	<b>90,859,027,651</b>
		1) Pengawasan	46,950,899,685
		2) Pemeriksaan	20,640,192,151
		3) Penegakan Hukum	13,212,991,474
		4) Penagihan	10,054,944,341
	b	<b>PKM Wider Rev Activities</b>	<b>5,339,013,697</b>
		1) Edukasi	836,391,141
		2) Pengawasan	4,494,501,290
		3) Pemeriksaan	3,267,110
		4) Penegakan Hukum	4,854,156
	c	<b>PKM Lainnya</b>	<b>37,693,231,371</b>
<b>Capaian Penerimaan</b>			<b>100.19%</b>
<b>Capaian PPM</b>			<b>100.16%</b>
<b>Capaian PKM</b>			<b>100.68%</b>
	-	Edukasi	101.35%
	-	Pengawasan & PKM Lainnya	100.63%
	-	Pemeriksaan	100.26%
	-	Penegakan Hukum	100.95%
	-	Penagihan	101.57%
<b>C Surplus / (Shortfall) (A-B) sd Desember 2024</b>			<b>4,460,442,488</b>
<b>1</b>	<b>PPM</b>		<b>3,554,169,769</b>
<b>2</b>	<b>PKM</b>		<b>906,272,719</b>

SEKTOR	NAMA	TAHUN PENERIMAAN 2024	KONTRIBUSI
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	228.695.412.573	9,50%
Z	PEJABAT NEGARA, KARYAWAN, PENSUNAN, TIDAK/BELUM BEKERJA	83.195.367.871	3,46%
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	620.619.141.867	25,78%
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	285.803.066.621	11,87%
F	KONSTRUKSI	41.077.799.012	1,71%
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	16.175.777.647	0,67%
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	14.241.624.086	0,59%
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	265.872.508	0,01%
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	8.237.544.277	0,34%
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	146.661.660.833	6,09%
T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	1.204.069.727	0,05%
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	648.364.744.802	26,93%
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	22.045.348.103	0,92%
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	16.019.780.696	0,67%
P	PENDIDIKAN	6.994.917.184	0,29%
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	356.385.047	0,01%
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	238.893	0,00%
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	99.866.025.457	4,15%
L	REAL ESTAT	18.275.015.754	0,76%
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	99.942.170.942	4,15%
R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	3.655.278.308	0,15%
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA	40.861.636.231	1,70%
unknown	Wajib Pajak KLU Error	5.272.429.049	0,22%

Sumber : Apportal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.407.831.307.488 dengan capaian sebesar 100.19% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor ND-24/WPJ.01/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM Per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Tahun 2024.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase realisasi penerimaan pajak	102.71%	123.91%	116.00%	104.29%	100.19%

Sumber : Apportal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala seperti penyetoran pajak atas kewajiban perpajakan yang tidak tepat waktu serta jangka waktu penyampaian penjelasan dari Wajib Pajak atas surat himbauan yang cenderung melewati jangka waktu yang seharusnya .

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%	100.00%	100.19%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%	100.19%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi.
- Mencari sumber baru penerimaan melalui kegiatan analisa mandiri dan kegiatan produksi alket.
- Memperluas basis Wajib Pajak.
- Melakukan tindakan penagihan aktif dan persuasif.
- Melakukan kegiatan pemeriksaan yang efektif.
- Mempercepat penyelesaian SP2.
- Memersuasi Wajib Pajak yang melakukan pengembalian pendahuluan agar memilih kompensasi. Pemanfaatan Data internal dan eksternal dengan maksimal

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh seksi terkait agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- Penyebab penurunan realisasi IKU ini adalah penyetoran pajak atas kewajiban perpajakan yang tidak tepat waktu serta jangka waktu penyampaian penjelasan dari Wajib Pajak atas surat himbuan yang cenderung melewati jangka waktu yang seharusnya.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi, mencari sumber baru penerimaan melalui kegiatan analisa mandiri dan kegiatan produksi alket, melakukan tindakan penagihan aktif

dan persuasif, dan melakukan kegiatan pemeriksaan yang efektif.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah melakukan pemantauan atas realisasi dari tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target, Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut:
- Menyelenggarakan IHT bagi Kepala Seksi Pengawasan dan AR mengenai ilmu perpajakan dalam melakukan pengawasan maupun communication skill serta negotiation skill terhadap Wajib Pajak.
  - Menyelenggarakan IHT bagi AR dan FPP terkait *transfer pricing*, *tax planning*, dan atau tema *tax avoidance* lainnya.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah Kepala KPP Pratama Medan Barat secara rutin melakukan pemantauan atas capaian penerimaan kemudian memberikan pengarahan kepada masing-masing seksi agar IKU tersebut dapat tercapai.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan

kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Melakukan pengawasan penerimaan pajak secara rutin serta melaksanakan rapat kinerja organisasi setiap bulannya untuk memitigasi capaian IKU.
- Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi.
- Mencari sumber baru penerimaan melalui kegiatan analisa mandiri dan kegiatan produksi alket.
- Memperluas basis Wajib Pajak.
- Melakukan tindakan penagihan aktif dan persuasif.
- Melakukan kegiatan pemeriksaan yang efektif.
- Mempercepat penyelesaian SP2.
- Memersuasi Wajib Pajak yang melakukan pengembalian pendahuluan agar memilih kompensasi.

2. **Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	115.00	110.00	110.00	110.00	110.00	108.89	108.89
Capaian	115.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	108.89%	108.89%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P bisa dilakukan dengan perbaikan regulasi, peningkatan pelayanan, edukasi, dan komunikasi publik, pengawasan pembayaran pajak secara berkala, pengawasan terhadap kepatuhan material wajib pajak, penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan, serta efisiensi dalam proses bisnis perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas, (1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan, (2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ . Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

d. Realisasi IKU

**Ranking KPP**

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	120.00 %	100.00 %	110.00 %
2	111. PRATAMA MEDAN BARAT	117.77 %	100.00 %	108.89 %
3	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	119.86 %	90.00 %	104.93 %
4	119. PRATAMA BINJAI	105.58 %	100.00 %	102.79 %
5	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	103.55 %	100.00 %	101.78 %
6	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	110.82 %	90.00 %	100.41 %
7	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	108.39 %	90.00 %	99.20 %
8	129. MADYA DUA MEDAN	95.60 %	100.00 %	97.80 %
9	123. MADYA MEDAN	87.25 %	90.00 %	88.63 %

Sumber : Mandor DJP

Capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 108.89%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	120.00%	99.36%	120.00%	-	-
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	118.81	108.89

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar 108.89.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100.00	108.89

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Target IKU tercapai melampaui target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Hal ini didukung oleh penghitungan prognosa yang mendekati angka penerimaan yang diperoleh setiap bulannya.

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	-	108.89

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:
    - Pemanfaatan Data internal dan eksternal dengan maksimal
    - Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi.
    - Mencari sumber baru penerimaan melalui kegiatan analisa mandiri dan kegiatan produksi alket.
    - Melakukan tindakan penagihan aktif dan persuasif.
    - Melakukan kegiatan pemeriksaan yang efektif.
    - Mempercepat penyelesaian SP2.
    - Memersuasi Wajib Pajak yang melakukan pengembalian pendahuluan agar memilih kompensasi.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Adanya anomali jumlah penerimaan kas bruto yang membesar.
  - Adanya pembayaran diluar perhitungan prognosa penerimaan
  - Adanya kegagalan pembayaran wajib pajak yang telah direncanakan pembayaran dan dimasukkan dalam penyusunan prognosa
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan melakukan pengawasan dan selalu berkoordinasi dengan seksi terkait untuk mendapatkan prognosa yang akurat.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi dengan cara membangun sinergi antara AR dan Administrator Sistem dalam hal penyediaan data terkait penyusunan prognosa setiap bulannya.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam mencapai IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah dengan cara mengoptimalkan kualitas prognosa penerimaan setiap bulannya.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).  
Pelaksanaan IKU Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilaksanakan dengan penuh sinergi antar sesama pegawai tanpa membedakan gender.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.  
KPP Pratama Medan Barat ikut menjadi bagian dari sumber penerimaan untuk melaksanakan program-program strategis pemerintah.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya  
 Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Pajak KPP Pratama Medan Barat, diantaranya:
- Melakukan penghitungan prognosa penerimaan secara akurat.
  - Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi.
  - Mencari sumber baru penerimaan melalui kegiatan analisa mandiri dan kegiatan produksi alket.
  - Memperluas basis Wajib Pajak.
  - Melakukan tindakan penagihan aktif dan persuasif.
  - Melakukan kegiatan pemeriksaan yang efektif.
  - Mempercepat penyelesaian SP2.
  - Memersuasi Wajib Pajak yang melakukan pengembalian pendahuluan agar memilih kompensasi.

3. **Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	24.83%	55.31%	55.31%	71.53%	71.54%	100.16%	100.16%
Capaian	107.96%	110.68%	110.62%	95.37%	95.39%	100.16%	100.16%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi,

Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d. Realisasi IKU

Customer Perspective							20,00%	101,79
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,89
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,16

Sumber : Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor ND-24/WPJ.01/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM Per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.273.940.034.769 dengan persentase realisasi sebesar 110,16%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	123.08%	126.27%	107.30%	100.16%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2024.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.00%	100.00%	100.16%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-	100.16%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

Pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak yang masih belum melakukan penyetoran setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui pada tahun pajak berjalan.

- Pemantauan setoran pajak Instansi Pemerintah pusat maupun

daerah.

- Koordinasi kepada Instansi Pemerintah terkait realisasi belanja sampai dengan akhir Desember 2024.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR, Pemeriksa dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
  - Pengawasan rutin akan kinerja AR, Pemeriksa, dan penyuluh untuk mencapai target IKU.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut.
- Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb).

- Mengadakan bimbingan dan/atau sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak.
  - Melakukan peningkatan penyuluhan tidak langsung (satu arah, dua arah, dan pihak ketiga) melalui kanal (social media dan situs web).
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan pengawasan secara rutin capaian penerimaan dari kegiatan PPM dan melakukan optimalisasi atas rencana/strategi penerimaan yang telah disepakati.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).  
Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.  
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya  
Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:
- Pengawasan pembayaran dan pelaporan.
  - Penerbitan STP.
  - Penelitian atas faktur pajak yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan.
  - Penelitian atas data pemicu dan penguji di Approweb.
  - Penelitian dan pengujian atas pemenuhan permohonan kewajiban insentif perpajakan dan penelitian kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif perpajakan.
  - Fungsional Pemeriksa melakukan himbauan secara persuasif dan melakukan pemantauan pencairan tunggakan pajak atas semua SKP terbit sampai dengan saat jatuh tempo.
  - Menyusun 100 daftar prioritas penagihan dan melakukan tindakan

penagihan dengan berfokus pada daftar prioritas penagihan tersebut dan memanfaatkan data ability to pay.

- Fungsional Pemeriksa Pajak mendorong WP untuk berkomitmen melunasi ketetapan pajak yang disetujui.
- Menggiatkan kegiatan blokir rekening dengan memanfaatkan data perbankan.
- Meningkatkan upaya persuasif kepada WP untuk membayar tunggakan pajaknya melalui *Account Representative*.
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan membuat bank data rekening dan data aset WP.
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan I sampai dengan Seksi Pengawasan VI sebelum melakukan pemberitahuan Surat Paksa,
- Menyegerakan penyelesaian pemeriksaan khusus dengan memprioritaskan WP yang tidak terdampak pandemi Covid-19 dan memiliki kemampuan bayar.

#### 4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	99.68%	110.29%	110.29%	109.63%	109.62%	106.63%	106.63%
Capaian	166.13%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	106.63%	106.63%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

##### b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024

(tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK- 9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

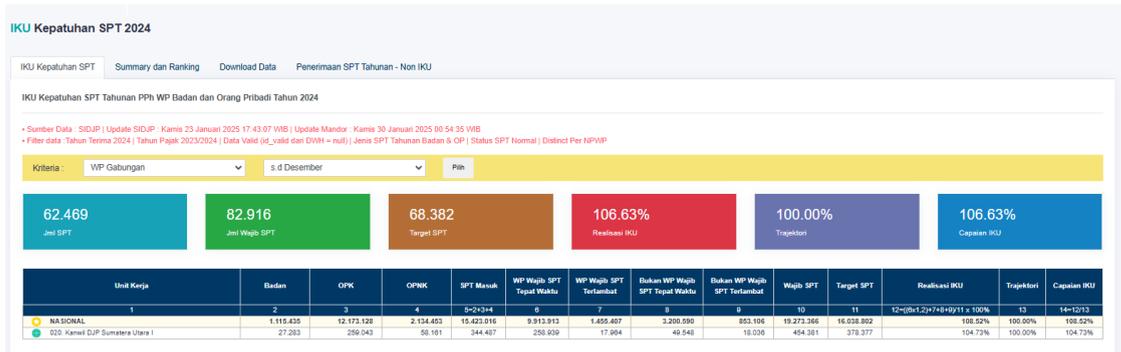
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

## d. Realisasi IKU



Sumber : Mandor DJP

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 106.63% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor ND-3885/WPJ.01/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penyampaian Harmonisasi Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis dan Lainnya ( Berbasis Kewilayahan) KPP di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	89.97%	101.20%	100.59%	90.69%	106.63%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk tahun 2024 kembali mengalami kenaikan sehingga realisasi dapat tercapai pada setiap triwulan. Ada beberapa faktor pendukung yaitu diantaranya nya:

1. Kembalinya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan nya.
2. Nomor HP dan email yang sudah sinkron dengan DJP Online

sehingga memudahkan petugas untuk menghubungi wajib pajak.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100.00%	106.63%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	-	106.63%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengirimkan himbauan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 melalui melalui surat himbauan dan WA Blast.
- Menghubungi wajib pajak melalui WA/Telepon.
- Menerbitkan STP.
- Melakukan koordinasi dengan pemberi kerja baik Intansi Pemerintah maupun swasta

- Mengidentifikasi WP belum lapor terdapat SP2DK sehingga saat pelaksanaan konseling WP dihimbau untuk melaporkan SPT Tahunan.
- b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kenaikan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:
- Peningkatan kesadaran pajak wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.
  - Penyediaan sistem pelaporan pajak yang lebih user-friendly, baik melalui aplikasi maupun website, memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut.
- Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala dan melakukan penambahan kanal Whatsapp interaktif menjadi 10

nomor Whatsapp pelayanan interaktif.

- Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak pada masyarakat.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Medan Barat, diantaranya:

- Menghubungi/menghimbau Wajib Pajak melalui WA/telepon.
- Melakukan kunjungan kerja/visit ke wajib pajak dalam rangka konseling pelaporan SPT Tahunan PPh.
- Menerbitkan Surat Teguran terhadap WP Wajib SPT yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.
- Melakukan kunjungan kerja ke pemerintah setempat (kelurahan/kecamatan) agar dapat menghimbau pegawai maupun warganya untuk menyampaikan SPT Tahunan.

## 5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian

## Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	11.30%	21.28%	21.28%	36.11%	36.11%	100.68%	100.68%
Capaian	45.20%	42.56%	42.56%	48.15%	48.15%	100.68%	100.68%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

### b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### c. Formula IKU

$$\left( \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \right) \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Target Baru 2024		
<b>A Target sd Desember 2024</b>		<b>2,403,370,865,000</b>
<b>1 PPM</b>		<b>2,270,385,865,000</b>
<b>2 PKM</b>		<b>132,985,000,000</b>
a Edukasi	825,249,000	
b Pengawasan & PKM Lainnya	88,576,344,000	
c Pemeriksaan	20,590,687,000	
d Penegakan Hukum	13,092,973,000	
e Penagihan	9,899,747,000	
<b>B Realisasi sd Desember 2024</b>		<b>2,407,831,307,488</b>
<b>1 PPM</b>		<b>2,273,940,034,769</b>
a PPM Bruto	2,307,915,348,318	
b SPMKP	(33,975,313,549)	
<b>2 PKM</b>		<b>133,891,272,719</b>
a <b>PKM Aktivitas</b>		<b>90,859,027,651</b>
1) Pengawasan	46,950,899,685	
2) Pemeriksaan	20,640,192,151	
3) Penegakan Hukum	13,212,991,474	
4) Penagihan	10,054,944,341	
b <b>PKM Wider Rev Activities</b>		<b>5,339,013,697</b>
1) Edukasi	836,391,141	
2) Pengawasan	4,494,501,290	
3) Pemeriksaan	3,267,110	
4) Penegakan Hukum	4,854,156	
c <b>PKM Lainnya</b>		<b>37,693,231,371</b>
<b>Capaian Penerimaan</b>		<b>100.19%</b>
<b>Capaian PPM</b>		<b>100.16%</b>
<b>Capaian PKM</b>		<b>100.68%</b>
- Edukasi		101.35%
- Pengawasan & PKM Lainnya		100.63%
- Pemeriksaan		100.26%
- Penegakan Hukum		100.95%
- Penagihan		101.57%
<b>C Surplus / (Shortfall) (A-B) sd Desember 2024</b>		<b>4,460,442,488</b>
<b>1 PPM</b>		<b>3,554,169,769</b>
<b>2 PKM</b>		<b>906,272,719</b>

Sumber : Apportal DJP

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 sesuai dengan ND-24/WPJ.01/2025 tanggal 03 Januari 2025 tercatat sebesar Rp133.891.272.791 dengan capaian sebesar 100,68% dari target. Mayoritas jenis pajak tumbuh positif yang dari keseluruhan jenis pajak sepanjang tahun 2024. Beberapa Kategori yang menopang tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah Penerimaan dari kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, kegiatan penagihan, dan kegiatan edukasi.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan	-	134.29%	101,29%	62,71%	100,68%

Material (PKM)					
----------------	--	--	--	--	--

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 1 (satu) tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	100.00%	100.68%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	100.68%

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti DPP Kolaboratif Tahun 2024 pada aplikasi Approweb dengan menerbitkan LHPT dan/atau SP2DK
- Menindaklanjuti SP2DK Outstanding yang terdapat pada aplikasi Approweb.
- Melaksanakan konseling dan/atau visit sebagai tindak lanjut kegiatan aktivitas penelitian kepatuhan material melalui SP2DK.
- Menginput tindak lanjut atas SP2DK pada aplikasi Approweb.
- Perekaman LHP2DK dalam pengawasan maupun usul pemeriksaan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan dan tindaklanjut terhadap data PKM yang sudah disediakan agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih terarah.

- e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan SP2DK dan himbauan WRA atas WP2 LPSE dan Bendahara Pemerintah.

- Meningkatkan tindak lanjut atas WP DPP Smt 1 dan 2 dengan lebih aktif melakukan contact maupun visit atas WP2 yang telah diterbitkan SP2DK.

- f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- g. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:

- Meningkatkan SP2DK dan himbauan WRA atas WP2 LPSE dan Bendahara Pemerintah.
- Meningkatkan tindak lanjut atas WP DPP Smt 1 dan 2 dengan lebih aktif melakukan contact maupun visit atas WP2 yang telah diterbitkan SP2DK.
- Meningkatkan usulan pemeriksaan atas WP Outstanding maupun DPP.

- Meningkatkan surat imbauan dalam rangka WRA atas WP2 Potensial dengan ATP bagus terutama WP HWI dan Sektor Perdagangan.
- Melakukan upaya2 pengamanan penerimaan pajak di akhir tahun WP2 Bendahara terutama dengan DiPA besar.
- Memperbanyak pengumpulan dan pengolahan data baik data internal maupun eksternal yang valid sebagai bahan baku dalam imbauan dalam rangka WRA.
- Tetap melakukan kunjungan lapangan, menghubungi wajib pajak dan mengirimkan WA Blast kepada wajib yang belum menyampaikan klarifikasi.

#### 6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	12.21%	51.93%	51.93%	86.03%	86.03%	88.80%	88.80%
Capaian	122.10%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

##### b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan

melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. BKegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Dashboard Penyuluhan Adianto Legowo

Dashboard Utama **Data Unit Kerja** Detail Data Panduan Penyuluhan 2023

### Data Unit Kerja

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
111	PRATAMA MEDAN BARAT	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	104.55 %	42.18 %	88.80 %	109.73 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4103140000	KPP Pratama Medan Barat	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	104.55 %	42.18 %	88.80 %	109.73 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

Sumber : Mandor DJP

Capaian Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 tetap tercapai 88.80% dari target sebesar 74.00% dengan indeks capaian sebesar 120% dengan tetap mempertahankan kualitas kegiatan edukasi dari penyuluhan terhadap wajib pajak. Perubahan perilaku didukung juga dengan kualitas SDM yang mampu melakukan dengan optimal.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74.00%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	-	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
    - Memberikan penyuluhan kepada bendahara instansi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat
    - Mengadakan kelas pajak
    - Melaksanakan penyuluhan dari IG live
    - Mengundang WP dengan jumlah yang cukup banyak saat penyuluhan
  - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan penyuluhan Wajib Pajak oleh Fungsional Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar menjadi lebih optimal.
  - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah tetap melakukan penyuluhan kepada wajib pajak baik melalui kelas pajak atau pun dengan TPT Helpdesk agar dapat memenuhi perubahan perilaku lapor dan bayar dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas penyuluhan sehingga kegiatan penyuluhan yang dilakukan lebih terarah dan pemberian edukasi kepada Wajib Pajak melalui berbagai kanal.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek terkait penyuluhan perpajakan.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penyuluhan dan menyampaikan hasil pemantauan kinerja penyuluhan secara rutin.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai PKP
- Memperbanyak kelas pajak
- Menyortir data WP yang telat bayar dan telat lapor untuk disuluh
- Membuat IG live dan podcast tentang perpajakan

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	5.00%	5.00%	10.00%	15.00%	15.00%	100.00	100.00
<b>Realisasi</b>	6.17%	6.31%	12.48%	18.00%	18.00%	107.61	107.61
<b>Capaian</b>	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	107.61%	107.61%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan

serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

LAMPIRAN  
Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat  
Nomor: [@NomorIND]  
Tanggal: [@TanggalIND]

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
	<b>KANWIL DJP SUMATERA UTARA I</b>	<b>92.75</b>	<b>88.51</b>	<b>87.74</b>		<b>89.67</b>			<b>92.95</b>	<b>110.95</b>
332	KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN	92.62	84.97		88.80		92.05	110.05		
333	KPP PRATAMA BINJAI	94.99	85.99		90.49		93.80	111.80		
334	KPP MADYA MEDAN	87.85	85.58		86.61		89.78	107.78		
335	KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	93.81	88.50		91.15		94.49	112.49		
336	KPP PRATAMA MEDAN BARAT	88.19	84.70		86.44		89.61	107.61		
337	KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	91.12	87.07		89.10		92.36	110.36		
338	KPP MADYA DUA MEDAN	96.73	94.27		95.50		98.99	116.99		
339	KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	94.25	88.11		91.18		94.51	112.46		
340	KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	89.45	85.42		87.43		90.63	108.63		

Sumber : Nota Dinas Direktur P2HUMAS Nomor ND-4331/WPJ.01/2024  
 Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian persentase sebesar 107.61%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	107.61%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

4)

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	100.00%	100.00%	107.61%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	------------------	----------------------

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	100.00%	107.61%
--	---------	---------	---------

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

6) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penyuluhan yang tepat sasaran.
- Memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan link survei kepada Wajib Pajak pada saat permohonan/penyuluhan/konsultasi selesai.
- Memberitahukan tata cara pengisian survei kepada Wajib Pajak

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kualitas layanan yang diberikan dan penyelesaian permohonan tepat waktu.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan edukasi dan memberikan Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan

yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Capaian atas kinerja Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring atas survey terhadap tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak, serta menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan survey.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko keluhan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek terkait penyuluhan perpajakan untuk SDM yang terlibat dalam penyuluhan perpajakan.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendali Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi pelayanan, menyampaikan hasil pemantauan survey secara rutin dan menindaklanjuti survey tersebut untuk mengatasi kendala pelayanan yang tidak memuaskan.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.  
Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.  
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

#### 7) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Pajak KPP Pratama Medan Barat, diantaranya:

- Melakukan kegiatan penyuluhan yang meliputi : 1. Penyuluhan kepada calon WP, 2. Penyuluhan kesadaran pajak, dan 3. Penyuluhan perubahan perilaku lapor dan bayar
- Perluasan Pakta Integritas
- Memberikan fasilitas umum di TPT yang mampu memberikan rasa nyaman kepada Wajib Pajak.
- Pembuatan Link Suvei Pelayanan

## 8. Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	120.00 %	118.22%	118.22%	108.00%	108.00%	115.72%	115.72 %
Capaian	133.33 %	120.00%	120.00%	120.00%	120.00 %	120.00%	120.00 %

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

### b. Definisi IKU

Optimalisasi "Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

c) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis): Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.

d) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan; Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki

target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

e) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

f) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

- Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

g) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data

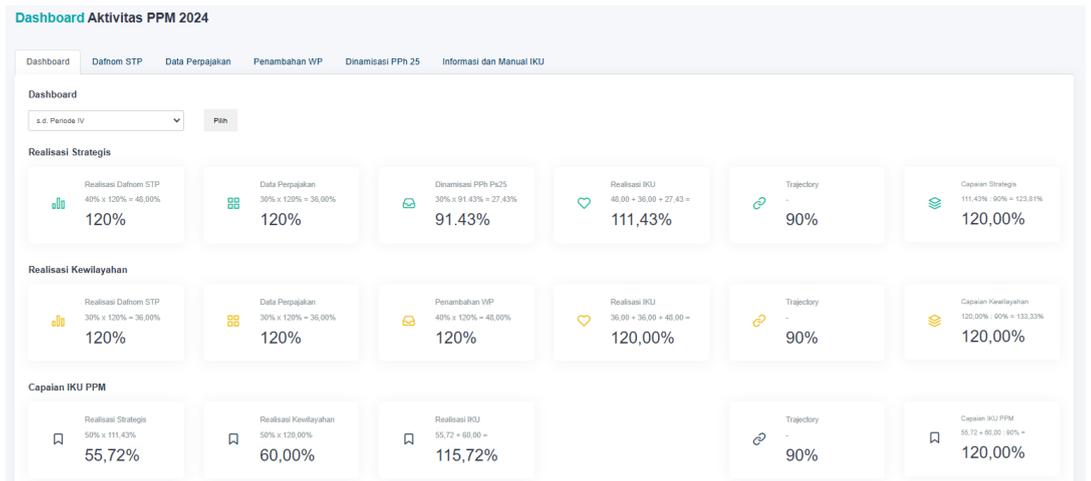
Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian, 40% untuk Kualitas Penelitian.

c. Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100\%}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

Sumber : Manual IKU Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU



Sumber : Mandor DJP

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai realisasi 115.72% dari trajectory sebesar 90.00% dengan capaian IKU sebesar 120.00% yang terdiri dari 55.72% realisasi capaian IKU PPM Strategis dan 60.00% realisasi capaian IKU PPM Kewilayahan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111.11%	105.24%	116.18%	115.72%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 mencapai sebesar 115.72%. Hal tersebut dikarenakan *Account Representative* mampu melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pembayaran masa Wajib Pajak berbasis kewilayahan dengan baik dengan penindaklanjutan yang optimal atas daftar nominatif STP, penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 25, dan tindak lanjut data perpajakan yang masih berjalan.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

	Dokumen Perencanaan	Kinerja
--	---------------------	---------

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Persentase pengawasan pembayaran masa	100.00%	90.00%	90.00%	115.72%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	-	115.72%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
    - Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan/pembayaran ataupun pembayaran untuk masa November sebelum tahun berjalan sampai dengan Triwulan III 2024.
    - Menerbitkan dan menindaklanjuti SP2DK atas data ekstensifikasi sampai dengan terbitnya LHP2DK.
    - Menindaklanjuti data matching yang tersedia pada aplikasi Approweb
  - b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.  
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:
    - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja Pengawasan pembayaran masa pajak KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR agar terus mengikuti perkembangan kegiatan

- ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, penindaklanjutan data dan monitoring pembayaran masa sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan/pembayaran ataupun pembayaran untuk masa November sebelum tahun berjalan sampai dengan Triwulan III 2024.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Pengawasan Pembayaran Masa berbasis Kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah menindaklanjuti data monitoring dan evaluasi mengenai progress realisasi IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.  
Realisasi pengawasan pembayaran masa pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan/pembayaran.
- Menindaklanjuti data sebaran ekstensifikasi.
- Menindaklanjuti data matching yang tersedia pada aplikasi Approweb.

**9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	107.29%	107.29%	102.82%	102.82%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	107.29%	107.29%	102.82%	102.82%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan

Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan

Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur

dalam SE- 05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE- 09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen, Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

- **Komponen Kuantitas**

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

- **Komponen Kualitas**

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

c. **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan =  $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$ .

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis =  $(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$ .

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) =  $(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$ .

d. **Realisasi IKU**

Ranking KPP				
185	021-PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	120.00 %	120.00 %	120.00 %
186	066-PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN	120.00 %	120.00 %	120.00 %
187	811-PRATAMA KENDARI	120.00 %	120.00 %	120.00 %
188	602-PRATAMA MOJOKERTO	120.00 %	120.00 %	120.00 %
189	517-PRATAMA SEMARANG CANDISARI	120.00 %	120.00 %	120.00 %
190	077-PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
191	009-PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	120.00 %	120.00 %	120.00 %
192	833-PRATAMA POSO	120.00 %	120.00 %	120.00 %
193	622-PRATAMA KEDIRI	120.00 %	120.00 %	120.00 %
194	111-PRATAMA MEDAN BARAT	120.00 %	120.00 %	120.00 %
195	103-PRATAMA MEULABOH	120.00 %	120.00 %	120.00 %
196	068-PRATAMA JAKARTA JAGAKARSA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
197	707-PRATAMA PONTIANAK TIMUR	120.00 %	120.00 %	120.00 %
198	923-PRATAMA ENDE	120.00 %	120.00 %	120.00 %
199	224-PRATAMA IAMBITEI ANAIBIDA	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber : Mandor DJP

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120.00% dari trajectory sebesar 100.00%. Penyelesaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini didukung pembuatan penelitian dan analisa (LHPt), penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) atas wajib pajak strategis dan kewilayahan yang optimal.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120.00 %	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak pada tahun 2024 selalu mencapai capaian maksimal dari 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan konsistensi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak yang dilakukan untuk Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana

Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti DPP pada aplikasi Approweb dengan menerbitkan LHPt/SP2DK
- Melakukan konseling dan/atau visit sebagai tindak lanjut SP2DK
- Menginput tindak lanjut atas SP2DK pada aplikasi Approweb

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penyelesaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring SP2DK yang masih outstanding sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dan Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara berkala berupa rapat pembinaan/sharing-session yang melibatkan AR, dan Kepala Seksi Pengawasan, Melakukan tindaklanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon atau media lain,

Melakukan sharing session/rapat pembinaan berupa monitoring atau evaluasi mengenai capaian P4DK Strategis Melakukan Bedah Wajib Pajak secara rutin dan berkala.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan konseling dan/atau visit sebagai tindak lanjut SP2DK
- Menginput tindak lanjut atas SP2DK pada aplikasi Approweb

#### 10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	111.91%	111.91%	113.52%	113.52%	118.03%	118.03%
Capaian	120.00%	111.91%	111.91%	113.52%	113.52%	118.03%	118.03%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan). Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase

Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT; tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper). Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU

Formula
<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

Ranking	KPP	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
1	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
2	128. MADYA DUA MEDAN	120,00 %	120,00 %	120,00 %
3	111. PRATAMA MEDAN BARAT	120,00 %	120,00 %	120,00 %
4	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	120,00 %	120,00 %	120,00 %
5	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	118,88 %	120,00 %	119,44 %
6	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	111,56 %	120,00 %	115,78 %
7	119. PRATAMA BINJAI	100,90 %	120,00 %	110,45 %
8	123. MADYA MEDAN	93,94 %	120,00 %	108,97 %
9	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	72,00 %	120,00 %	96,00 %

Sumber : Mandor DJP

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120,00%

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120.00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mencapai target sebesar 120,00% .

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100.00%	120,00%

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100.00%	100.00%	120,00%

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan STP keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan) yang tersedia di daftar nominatif pada Approweb.
- Menindaklanjuti data matching yang tersedia pada aplikasi Approweb.
- Memanfaatkan Approweb dan Apportal sebagai sumber data untuk melakukan penggalan potensi Wajib Pajak.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan penindaklanjutan atas data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring pemanfaatan data STP dan data matching sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin

sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan aplikasi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas IKU ini diperoleh tanpa dokumentasi mitigasi risiko dalam piagam risiko tahun 2024.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penindaklanjutan data STP dan data matching dengan memanfaatkan data yang tersedia maupun hasil evaluasi masing-masing AR.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pemanfaatan data dalam tahun berjalan merupakan salah satu upaya penggalan potensi perpajakan yang digunakan sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Menindaklanjuti daftar nominatif yang tersedia pada aplikasi Approweb.
- Menindaklanjuti data matching yang tersedia pada aplikasi Approweb .
- Memanfaatkan Approweb dan Apportal sebagai sumber data untuk melakukan penggalan potensi Wajib Pajak .

11. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	144.76%	144.76%	96.07%	96.07%	108.14%	108.14%
Capaian	120.00%	144.76%	144.76%	96.07%	96.07%	108.14%	108.14%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

- Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan

yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Komponen 3**

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE- 05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

**c. Formula IKU**

<b>Formula:</b>
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

**d. Realisasi IKU**

17	06c-N	020	111	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN BARAT	109.29%	55.00%	120.00%	108.14%
13	06c-N	020	112	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN BELAWAN	79.13%	55.00%	120.00%	110.07%
12	06c-N	020	113	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN TIMUR	31.29%	55.00%	56.89%	88.20%
15	06c-N	020	119	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA BINJAI	67.03%	55.00%	120.00%	114.13%
11	06c-N	020	121	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN POLONIA	122.58%	55.00%	120.00%	112.06%
10	06c-N	020	123	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	MADYA MEDAN	100.00%	55.00%	120.00%	117.20%
14	06c-N	020	124	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN PETISAH	1074.70%	55.00%	120.00%	105.32%
16	06c-N	020	125	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA LUBUK PAKAM	156.79%	55.00%	120.00%	105.45%
9	06c-N	020	129	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	MADYA DUA MEDAN	100.00%	55.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Nota Dinas Kantor Pusat

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 108,14% dari target yang telah diberikan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	108,14%
--	---	---	---	---	---------

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 merupakan IKU yang baru dan tidak memiliki data historis. IKU ini mampu mencapai lebih dari target sebesar 108,14% dikarenakan adanya pengawasan pelaksanaan tugas komite kepatuhan yang tepat waktu dan kualitas penyediaan bahan baku terhadap target yang terealisasikan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100.00%	108,14%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat	100.00%	-	108,14%

waktu			
-------	--	--	--

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Merumuskan rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Tepat Waktu Ke Kanwil
- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan Secara Rutin sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan
- Mengirimkan LHR kepada seluruh peserta rapat Komite Kepatuhan
- Menyiapkan Bahan Pemeriksaan
- Melakukan pembahasan adjustment atas DSP4 yang turun dari KPDJP
- Membuat usulan DPP Mandatory
- Melakukan penetapan DSP4 Kolaboratif Tepat Waktu

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan rapat koordinasi terkait bahan baku dan pemilihan Wajib Pajak yang akan di usulkan pada rapat komite kepatuhan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring tindaklanjut pada bahan baku yang sudah disepakati agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan

Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelaksanaan KKWP tepat waktu, membuat susunan bahan baku pemeriksaan, dan meningkatkan kualitas raport kinerja organisasi.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Mitigasi risiko atas risiko Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan tidak mencapai target adalah dengan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi komite kepatuhan secara berkala.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan melaksanakan rapat komite kepatuhan yang meliputi pembahasan DSP4 serta meningkatkan kualitas raport kinerja organisasi.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.  
Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.  
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini diantaranya:

- Merumuskan rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Menindaklanjuti data pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan untuk mencapai target PKM.
- Menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Tepat Waktu Ke Kanwil
- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan Secara Rutin sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan
- Mengirimkan LHR kepada seluruh peserta rapat Komite Kepatuhan
- Menyiapkan Bahan Pemeriksaan
- Melakukan pembahasan adjustment atas DSP4 yang turun dari KPDJP
- Membuat usulan DPP Mandatory
- Melakukan penetapan DSP4 Kolaboratif Tepat Waktu
- Menyusun program dan kegiatan pokok terkait penerimaan pajak

## 12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	98.49%	98.49%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	98.49%	98.49%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan;

dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu, Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) +  
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

d. Realisasi IKU

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
Selasa, 31 Desember 2024						
	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	77.34%	103.12%	15.47%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	105.73%	105.73%	26.43%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	419.76%	120.00%	36.00%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	113.43%	120.00%	30.00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	88.46%	120.00%	6.00%
<b>Realisasi IKU</b>						<b>113.90%</b>
*Max 120%						
<b>Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)</b>		<b>120.00%</b>				
*Max 120%						

Sumber : Perhitungan manual IKU Pemeriksaan

2024 TAHUN

IKU Tingkat Efektifitas Penilaian > Kanwil DJP Sumatera Utara I

No.	Kantor	Jumlah Laporan						Ketepatan Waktu						Traj. 2 Penilai	% Waktu	Capaian	
		Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (non-DPP)	NJOP-L	s.d. 1 bulan	s.d. 2 bulan				lebih dari 2 bulan
1	Kanwil DJP Sumatera Utara I	126.00	239.75	200.44%	85%	120.00%	120.00%	68	2	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
2	KPP Madya Medan	14.00	17.50	125.00%	85%	120.00%	120.00%	7	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
3	KPP Madya Dua Medan	1.00	1.00	100.00%	85%	120.00%	120.00%	2	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
4	KPP Pratama Medan Barat	1.00	1.00	100.00%	85%	120.00%	120.00%	4	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
5	KPP Pratama Medan Belawan	14.00	20.50	146.43%	85%	120.00%	120.00%	5	-	-	9	-	-	-	90%	119.05%	119.62%
6	KPP Pratama Medan Timur	1.00	2.25	225.00%	85%	110.03%	120.00%	7	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
7	KPP Pratama Medan Polonia	1.00	0.85	85.00%	85%	120.00%	120.00%	3	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
8	KPP Pratama Binjai	28.00	31.60	112.86%	85%	120.00%	120.00%	10	-	-	1	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
9	KPP Pratama Lubuk Pakam	28.00	49.15	175.54%	85%	109.37%	120.00%	14	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%
10	KPP Pratama Medan Petisah	1.00	2.50	250.00%	85%	98.21%	120.00%	5	-	-	-	-	-	-	90%	120.00%	120.00%

Sumber : Appraisal DJP

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 120,00% dari target. Realisasi IKU merupakan IKU Baru dan tidak memiliki data historis. Untuk IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sendiri memiliki 2 komponen yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 60 % dan komponen tingkat efektivitas penilaian sebesar 40%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan	-	-	-	-	120,00%

Penilaian					
-----------	--	--	--	--	--

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 adalah IKU baru karena adanya penambahan tingkat efektivitas penilaian pada komponen IKU tersebut.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100.00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	-	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

    - Menginventarisir kembali tunggakan SP2 untuk segera dilakukan penyelesaian pemeriksaan.
    - Memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan khusus.

- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan agar selesai tepat waktu.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres kegiatan pemeriksaan khusus yang akan jatuh tempo.
  - Menentukan DSPP yang berkualitas dan memiliki kemampuan pembayaran yang tinggi agar WP mampu melunasi utang pajak sebagai hasil dari pemeriksaan.
  - Mengoordinasikan penyusunan rencana pemeriksaan yang berkualitas untuk menghasilkan pemeriksaan dengan output SKP yang tepat dan disetujui dalam pembahasan bersama wajib pajak.
  - Menyusun daftar Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan.
  - Menghubungi Wajib Pajak untuk mengembalikan SPOP ke KPP.
  - Menindaklanjuti data objek penilaian.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Pemeriksa dan Penilai agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga pengawasan atas wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan dan penilaian dapat ditindaklanjuti dengan optimal.
  - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, tindaklanjut dan monitoring usulan DSPP dan DSPn sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan memonitoring produksi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Penilaian baik dari segi kuantitas maupun kualitas secara rutin setiap bulanya.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko atas risiko IKU Persentase Pemeriksaan dan Penilaian adalah dengan cara penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo, menyelenggarakan atau mengikuti In House Training Time Management atau In House Training Lainnya guna meningkatkan kompetensi SDM Fungsional Pemeriksa Pajak, menyelenggarakan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis tentang kode etik dan kode perilaku, Membuat ND Kepala Seksi P3 yang berisi tunggakan SP2 dan tanggal jatuh tempo, dan mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pemeriksaan dan penilaian, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Pajak KPP Pratama Medan Barat, diantaranya:

- Menginventarisir kembali tunggakan SP2 untuk segera dilakukan penyelesaian pemeriksaan.
- Memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan khusus.
- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan agar selesai tepat waktu.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres kegiatan pemeriksaan khusus yang akan jatuh tempo.
- Menentukan DSPP yang berkualitas dan memiliki kemampuan pembayaran yang tinggi agar WP mampu melunasi utang pajak sebagai hasil dari pemeriksaan.
- Mengoordinasikan penyusunan rencana pemeriksaan yang berkualitas untuk menghasilkan pemeriksaan dengan output SKP yang tepat dan disetujui dalam pembahasan bersama wajib pajak.
- Menyusun daftar Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan.
- Menghubungi Wajib Pajak untuk mengembalikan SPOP ke KPP.
- Menindaklanjuti data objek penilaian

### 13. Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	15.22%	33.45%	33.45%	63.13%	66.57%	86.65%	86.65%
Capaian	101.47%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	115.53%	115.53%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka

mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3

(tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

c. Formula IKU

Tingkat efektivitas penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU

KODE KANWIL	KODE UNIT	NAMA UNIT	VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN	VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC	VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC	REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN S.D. TW IV 2024	MAX CAPAIAN 120%
020	111	PRATAMA MEDAN BARAT	59.02%	15.60%	12.03%	86.65%	75.00%	115.53%	115.53%
020	112	PRATAMA MEDAN BELAWAN	51.82%	17.60%	17.28%	86.70%	75.00%	115.60%	115.60%
020	113	PRATAMA MEDAN TIMUR	48.04%	10.00%	5.08%	63.12%	75.00%	84.16%	84.16%
020	119	PRATAMA BINJAI	55.16%	9.20%	20.30%	84.66%	75.00%	112.88%	112.88%
020	121	PRATAMA MEDAN POLONIA	54.55%	16.80%	10.54%	81.89%	75.00%	109.19%	109.19%
020	123	MADYA MEDAN	51.55%	24.00%	36.00%	111.55%	75.00%	148.73%	120.00%
020	124	PRATAMA MEDAN PETISAH	60.00%	18.00%	17.83%	95.83%	75.00%	127.77%	120.00%
020	125	PRATAMA LUBUK PAKAM	29.29%	12.00%	9.84%	51.13%	75.00%	68.17%	68.17%
020	129	MADYA DUA MEDAN	59.10%	24.00%	25.21%	108.31%	75.00%	144.41%	120.00%
020	020	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	58.99%	17.24%	26.19%	102.42%	75.00%	136.57%	120.00%

Sumber : Lampiran Nota Dinas Kanwil DJP Sumatera Utara

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan realisasi sebesar 86.65% dari target yang telah diberikan dengan indeks capaian sebesar 115.53%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	114.72%	93,15%	86.65%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	-	75.00%	86.65%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	75.00%	86.65%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan tindakan persuasif dengan menyampaikan himbauan pelunasan utang pajak, mengundang wajib pajak untuk hadir, dan melakukan konseling.
- Mengawasi laju pencairan DSPC dan Menyusun daftar 100 WP usulan DSPC.
- Melakukan optimalisasi soft collection
- Mendorong wajib pajak untuk memberikan komitmen pembayaran utang pajak.
- Melakukan tindakan persuasif baik melalui WA, SMS, telepon kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan
- Profiling Wajib Pajak dan Penanggung Pajak untuk tindak lanjut penagihan

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan kinerja realisasi efektivitas pengihan KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kegiatan penagihan oleh JSPN yang optimal
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah menyusun strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk pencairan piutang, yang mencakup pengawasan, edukasi, termasuk restrukturisasi utang WP yang kesulitan membayar agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

- c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi efektifitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah penyusunan strategi pencairan piutang per KPP, terutama fokus pada pendekatan berbasis data dengan melibatkan tim lintas fungsi.
- e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah mengusulkan IHT guna meningkatkan kompetensi Jurusita Pajak dan Mengadakan kegiatan bersama berupa rapat koordinasi (asset-tracing) antar seksi terkait penyelesaian piutang pajak.
- f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Realisasi efektifitas penagihan mengalami kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan

menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

- g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Efektivitas Penagihan KPP Pratama Medan Barat, diantaranya:

- Melakukan tindakan persuasif dengan menyampaikan himbauan pelunasan utang pajak, mengundang wajib pajak untuk hadir, dan melakukan konseling.
- Mengawasi laju pencairan DSPC dan Menyusun daftar 100 WP usulan DSPC.
- Melakukan optimalisasi soft collection
- Mendorong wajib pajak untuk memberikan komitmen pembayaran utang pajak.
- Melakukan tindakan persuasif baik melalui WA, SMS, telepon kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan
- Profiling Wajib Pajak dan Penanggung Pajak untuk tindak lanjut penagihan

**14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)**

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
-----	----	----	----	----	--------	----	---

Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	200.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan

untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**  
JALAN ASRAMA NOMOR 1A, MEDAN 20123  
 TELEPON (061) 5467967, 5454309, 5432273, FAKS/IMILS (061) 5467433, LAMAN www.djppk.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
 SURTEL: pengaduan@djppk.go.id, informasi@djppk.go.id

NOTA DINAS  
 NOMOR ND-1900/KPP.0102/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I  
 Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : Dua Set  
 Hal : Penyampaian Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul  
 Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024  
 Tanggal : 23 Desember 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum nomor ND-5153/PJ.05/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Permintaan Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan data usulan pemeriksaan bukti permulaan di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2024 atas nama Wajib Pajak sebagai berikut:

No	Nama	NPWP/Nomor Identitas	Tahun Pajak	Keterangan
1	Tan Boen Tjong	93.548.331.3-122.000	2020	Usulan diterima
2	Tan Boen Tjong	93.548.331.3-122.000	2022	Usulan diterima
3	Perintis Transmisi Asia	83.559.781.6-122.000	2024	Usulan diterima

Berikut juga kami sampaikan Nota Dinas serta Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana telah terlampir untuk dipergunakan sebagai dasar realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024 di KPP Pratama Medan Barat.

Sumber : Penyampaian Nota Dinas KPP Pratama Medan Barat

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 2 usulan (realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah Wajib Pajak, bukan usulan tahun pajak) dengan capaian sebesar 120%. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam

mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah IKU baru dan mampu mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi wajib pajak bukti permulaan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menggambarkan adanya wajib pajak yang perlu dilakukan tindak lanjut lebih setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Adanya wajib pajak yang berpotensi melakukan tindak pidana;

- Ditemukan penyimpangan-penyimpangan selama dilakukan pengawasan dan pemeriksaan;
  - Adanya koreksi SPT Tahunan yang perlu diusulkan pemeriksaan lebih lanjut;
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	120,00%

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- Pengumpulan data dan informasi wajib pajak untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
  - Menginventarisir data SP2DK status open dengan potensi pajak yang signifikan.
  - Mengidentifikasi wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan dan melakukan analisis atas proses bisnis dan potensi pajak Wajib Pajak.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:
- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar dapat terus memantau dan memitigasi jika ada wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.
  - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring semua wajib pajak yang beresiko tinggi agar dapat memenuhi

target yang telah ditentukan.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap wajib pajak yang memiliki resiko tinggi untuk dilakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah melakukan rapat pembahasan antara Kepala Kantor, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta Fungsional Pemeriksa atas Wajib Pajak yang akan di usulkan bukti permulaan.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi profiling semua wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.  
Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya  
 Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak KPP Pratama Medan Barat, diantaranya:
- Pengumpulan data dan informasi wajib pajak untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
  - Menginventarisir data SP2DK status open dengan potensi pajak yang signifikan.
  - Mengidentifikasi wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan dan melakukan analisis atas proses bisnis dan potensi pajak Wajib Pajak.
  - Berkoordinasi dengan Kanwil terkait Wajib Pajak yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (8a-CP)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	93.33%	116.81%	116.81%	116.81%	116.81%	120.00%	120.00%
Capaian	466.65%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki

kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan

untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi.

c. Formula IKU

Formula
<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

#### d. Realisasi IKU

##### Ranking KPP

Ranking	KPP	Realisasi	Capaian
1	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	228.23 %	120.00 %
2	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	173.07 %	120.00 %
3	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	157.22 %	120.00 %
4	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	143.45 %	120.00 %
5	111. PRATAMA MEDAN BARAT	139.93 %	120.00 %
6	119. PRATAMA BINJAI	138.08 %	120.00 %
7	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	130.92 %	120.00 %
8	123. MADYA MEDAN	125.71 %	120.00 %
9	129. MADYA DUA MEDAN	97.38 %	97.38 %
10	020. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	0.00 %	0.00 %
<b>Total</b>		<b>155.93 %</b>	<b>120.00 %</b>

Sumber : Mandor DJP

<p style="text-align: center;"><b>NOTA DINAS</b> NOMOR ND-520/KPP.0102/2024</p> <p>Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sifat : Biasa Lampiran : Satu Set Hal : Laporan Pengamatan a.n. SUSANTO Tanggal : 28 Maret 2024</p> <hr/> <p>Sehubungan dengan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan dengan Surat Perintah Pengamatan nomor PRIN-26/KPP.0102/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor ST-291/KPP.0102/2024 Tanggal 26 Maret 2024, dengan ini kami mengirimkan Laporan Pengamatan atas nama :</p> <p>Nama Wajib Pajak : Susanto NPWP : 59.277.259.4-122.000 Alamat : Jl Gandhi NO 72-196 Sei Rengas I, Medan Kota, Medan</p> <p>Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;"><b>NOTA DINAS</b> ND- 524/KPP.0102/2024</p> <p>Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Pengamatan a.n. Yey. Pendi. Teknologi Informasi Manajemen dan Edukasi Tanggal : 28 Maret 2024</p> <hr/> <p>Sehubungan dengan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan dengan Surat Perintah Pengamatan nomor PRIN-25/KPP.0102/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Surat Tugas nomor ST-287/KPP.0102/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan ini kami mengirimkan Laporan Pengamatan atas nama :</p> <p>Nama wajib pajak : Yey. Pendi. Teknologi Informasi Manajemen dan Edukasi NPWP : 02.200.421.2-122.000 Alamat : Jl Merbabu No. 32A-BB, Medan Kota, Kota Medan</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.</p>	 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> <b>KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I</b> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT</b> Jl. Garuda Pancasila No. 11, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20156 Telp. (061) 447.991, 447.992, 447.993, 447.994, 447.995, 447.996, 447.997, 447.998, 447.999 Faksimil : (061) 447.991, 447.992, 447.993, 447.994, 447.995, 447.996, 447.997, 447.998, 447.999 E-mail : jprptm@djpp.go.id, jprptm@kpp.go.id</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>NOTA DINAS</b> NOMOR ND-526/KPP.0102/2024</p> <p>Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan Pengamatan Tanggal : 1 April 2024</p> <hr/> <p>Sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengamatan nomor PRIN-28/KPP.0102/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Tugas nomor ST-275/KPP.0102/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan ini kami sampaikan Laporan Pengamatan atas Wajib Pajak berikut:</p> <p>Nama Wajib Pajak : CV Pilar Fajar Jaya Abadi NPWP : 92.525.828.1-111.000 Alamat : Jl. Guru Patimpai/Podomoro No. OPO Medan</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;"><b>NOTA DINAS</b> NOMOR ND-515/KPP.0102/2024</p> <p>Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Laporan Pengamatan a.n Hendry/ Rumah Makan A DOE A Tanggal : 27 Maret 2024</p> <hr/> <p>Sehubungan dengan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan dengan Surat Perintah Pengamatan nomor PRIN-21/KPP.0102/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor ST-265/KPP.0102/2024 tanggal 21 Maret 2024, dengan ini kami mengirimkan Laporan Pengamatan atas nama :</p> <p>Nama Wajib Pajak : Hendry/ Rumah Makan A DOE A NPWP : 82.375.548.7-111.000 NPWP : 02.200.421.2-122.000 Alamat : Jl. S. Paman NO 2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan</p> <p>Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA DINAS</b> NOMOR ND-484/KPP.0102/2024</p> <p>Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 Set Hal : Laporan Pengamatan an Ruesli/Banneton Bakery Tanggal : 27 Maret 2024</p> <hr/> <p>Sehubungan dengan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan dengan Surat Perintah Pengamatan nomor PRIN-22/KPP.0102/2024 tanggal 21 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor ST-244/KPP.0102/2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan ini kami mengirimkan Laporan Pengamatan atas nama :</p> <p>Nama Wajib Pajak : Ruesli / Banneton Bakery NPWP : 06.294.733.8-122.000 Alamat : Jl Kapten Jurnama No 136F, Medan Area, Kota Medan</p> <p>Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>
---	---	---

Sumber : Penyampaian Nota Dinas KPP Pratama Medan Barat

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120,00% yang terdiri dari realisasi penyelesaian laporan pengamatan (sebanyak 5 laporan dengan target 4 laporan) dengan realisasi 120,00% serta penyelesaian data potensi perpajakan dengan realisasi 139.93%. Kegiatan penyelesaian laporan kegiatan dan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami kendala sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 mencapai realisasi maksimal sama seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih tersedia dan terjangkauannya wajib pajak untuk di lakukan pengumpulan data dan dilakukan pengamatan oleh petugas pajak.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan	-	-	100.00%	120.00%

Penyediaan Data Potensi Perpajakan				
------------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100.00%	-	120.00%%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penerbitan alat keterangan terkait data yang ditemukan
- Mengumpulkan data eksternal dalam rangka penyediaan data potensi melalui penelitian kantor atas Wajib Pajak
- Meningkatkan kualitas pengumpulan data potensi perpajakan dari kegiatan visit/pengamatan lapangan

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Account Representative agar terus mengikuti perkembangan

- data untuk dapat menunjang tercapainya penerimaam kantor, termasuk melalui kegiatan pengamatan.
- Melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring data wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat adalah penempatan sumber daya manusia seefektif mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan peralatan elektronik secara bersama untuk bagian/seksi yang berada pada satu ruangan yang sama, serta memanfaatkan aplikasi yang ada baik yang berasal dari pusat maupun dari KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data lapangan dan melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Dalam pelaksanaan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pengumpulan data, menyampaikan hasil pemantauan data wajib pajak secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.  
Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib

Pajak yang membutuhkan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan penerbitan alat keterangan terkait data yang ditemukan
- Mengumpulkan data eksternal dalam rangka penyediaan data potensi melalui penelitian kantor atas Wajib Pajak.
- Melaksanakan kegiatan pengumpulan data potensi perpajakan melalui kegiatan visit ke lokasi wajib pajak dan kegiatan pengamatan.

## 16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%
Realisasi	9.47%	92.93%	92.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	94.70%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data

regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain Data Kendaraan Bermotor; Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan Data Sektor Pertambangan yang meliputi: Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.
- Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan. Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK- 228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).
- Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP

pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

c. Formula IKU

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	
Realisasi Tahun 2024 =	+
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

LAMPIRAN II

Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

Nomor : ND-663/WPJ.01/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

RESUME  
JENIS DATA REGIONAL DARI ILAP YANG WAJIB DISAMPAIKAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  
TAHUN 2024

UNIT KERJA	KATEGORISASI DATA			TOTAL
	DATA UTAMA	DATA LAINNYA	PENGECUALIAN	
1. KPP PRATAMA MEDAN BARAT	6	5	1	12
2. KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN				
3. KPP PRATAMA MEDAN TIMUR				
4. KPP PRATAMA MEDAN POLONIA				
5. KPP PRATAMA MEDAN PETISAH				
KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	5	1	1	7
KPP PRATAMA BINJAI	15	8	13	36
- (DATA PROVINSI)	4	14	1	19
<b>KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>74</b>



Ditandatangani secara elektronik  
Arridel Mindra

Sumber : ND-663/WPJ.01//2024 tanggal 29 Februari 2024

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I			Diurutkan Berdasar : Unit Kerja			Tahun Data : 2023			
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I (DATA PROPINSI)	4	3	1	13	3	1	74,15	Lihat
2	111 - KPP PRATAMA MEDAN BARAT	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
3	112 - KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN	6	6	6	6	6	6	100	Lihat
4	113 - KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
5	119 - KPP PRATAMA BINJAI	15	5	5	8	3	2	67,83	Lihat
6	121 - KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
7	124 - KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
8	125 - KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	6	5	5	1	1	1	100	Lihat

Sumber : <http://monitoringspt.intranet.pajak.go.id/>

Realisasi IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan realisasi capaian sebesar 120% dari target dengan indeks capaian sebesar 100%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100,00%	100,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 stabil di angka indeks 100% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam penghimpunan data regional antara KPP Pratama Medan Barat dengan Pemerintahan Daerah.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55.00%	100%
--	---	---	--------	------

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55.00%	-	100%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Monitoring penyampaian data yang telah diminta kepada Pemda.
- Koordinasi dengan Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan di Kanwil DJP Sumut I.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pengumpulan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pengumpulan data regional tahun 2024 didominasi dengan kegiatan kerjasama pengumpulan data regional ILAP antara KPP Pratama Medan Barat dan Pemerintahan Daerah.
- Upaya yang dilakukan ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring atas data regional ILAP yang diberikan Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun langkah efisiensi yang dilakukan adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menghimpun data regional ILAP yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Persentase penghimpunan data regional dari ILAP yang tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah memperkuat kolaborasi dan kerjasama antara KPP Pratama Medan Barat dan Pemerintah Daerah.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penghimpunan data, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan atas pertukaran data.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.  
Kontribusi yang telah diberikan KPP Pratama Medan Barat ialah dengan membangun fasilitas yang memadai untuk semua Wajib Pajak sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti parkir khusus penyandang disabilitas, parkir khusus Wajib Pajak wanita, jalur untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan kursi roda bagi Wajib Pajak yang membutuhkan.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya  
 Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:
- Monitoring penyampaian data yang telah diminta kepada Pemda.
  - Koordinasi dengan Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan di Kanwil DJP Sumut I.

## 17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	110,00	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,89%	116,89%
Capaian	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,89%	116,89%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

### b. Definisi IKU

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

#### 1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang

ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

## 2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang

disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024  
Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:
  1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
  2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

c. Formula IKU

Triwulan I s.d. III : (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)

Triwulan IV : (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

d. Realisasi IKU

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan logout dan pilih tahun anggaran pada halaman login.

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total	
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%		
1	KPP Pratama	0	0.00	24	26.4	110.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	2	2.2	110.00	110.00			
2	Seksi Pelayanan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	168	184.8	110.00	408	448.8	110.00	34	34.1	100.29	106.12	
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	264	282.6	107.05	0	0.00	0	0.00	288	309	107.29	24	22	91.67	101.04
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	24	100.00	144	158.4	110.00	0	0.00	0	0.00	168	182.4	108.57	14	15	107.14	108.00
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0	0.00	0	0.00	216	237.6	110.00	18	19.8	110.00	110.00
6	Seksi Pengawasan I	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0	0.00	0	0.00	216	237.6	110.00	18	19.6	108.89	109.56
7	Seksi Pengawasan II	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0.00	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00
8	Seksi Pengawasan III	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0.00	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00
9	Seksi Pengawasan IV	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0	0.00	0	0.00	216	237.6	110.00	18	19.8	110.00	110.00
10	Seksi Pengawasan V	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0.00	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00
11	Seksi Pengawasan VI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0.00	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00
12	Fungsional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	504	554.4	110.00	504	554.4	110.00	42	37.3	88.81	101.52	
TOTAL		0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	261.6	109.00	1872	2051.4	109.58	672	739.2	110.00	2808	3078.6	109.64	234	240.2	102.65	106.84	

Sumber : SIKKA DJP

DATA SURVEI KEBINTALAN PEJABAT ADMINISTRATOR 2024				
No	Eselon II	Eselon III	Nilai	Kategori
575	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bagian Umum	60	Kurang efektif
576	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan	60	Kurang efektif
577	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan	60	Kurang efektif
578	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	80	Efektif
579	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	60	Kurang efektif
580	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	60	Kurang efektif
581	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan	80	Efektif
582	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan	80	Efektif
583	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	80	Efektif
584	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	80	Efektif
585	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	60	Kurang efektif
586	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	80	Efektif
587	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	60	Kurang efektif
588	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia	80	Efektif
589	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	60	Kurang efektif

Sumber : Nota Dinas Direktur KITSDA

Realisasi pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 116,89% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 116,89%.

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,89	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,89
------	---	--------	--------	-----	-----	--------	--------	--------

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi

IKU ini merupakan iku baru sehingga belum bisa ditentukan besaran pertumbuhannya. Adapun komponen dalam penyusunan realisasi IKU ini diantaranya Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai untuk Komponen 1 (Kualitas Kompetensi), dan Pelaksanaan Kegiatan, Feedback peserta, dan Kepatuhan pelaporan untuk Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM).

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	116,89%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 ialah sebesar 116,89%. IKU ini merupakan iku baru, sehingga tidak terdapat data pertumbuhan yang dapat disajikan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100.00%	116,89%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00%	-	116,89%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan Nota Dinas kepada seluruh pegawai perihal Penugasan Akses Modul E-learning mengenai kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural serta menerapkannya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-

hari.

- Melakukan monitoring berkala capaian jmlat pegawai.
  - Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan kebintalan di setiap triwulan dengan memilih bidang yang diperlukan pada triwulan tersebut (ideologi, rohani, kompetensi, kejiwaan).
  - Melaporkan kegiatan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar oleh tim dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sehingga seluruh kegiatan baik uji kompetensi dan kebintalan SDM dapat berjalan dengan baik.
  - Upaya yang dilakukan ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pemenuhan pelaksanaan serta pemenuhan jam pelajaran pegawai agar dapat memenuhi target.
- c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efesiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efesiensi yang dilakukan adalah terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan atau tidak melaksanakan uji kompetensi, pemenuhan jam pelajaran, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Medan Barat.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dalam pemenuhan pelaksanaan kompetensi dan kebintalan SDM.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
- Dalam pelaksanaan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat pegawai yang tidak mengetahui terhadap pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan kebintalan SDM sehingga melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selama 2024 terus

memonitoring pegawai yang belum melaksanakan pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan tersebut.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai kesetaraan gender, semua pegawai mendapatkan hak yang sama untuk diusulkan mengikuti IHT ataupun kegiatan kebintalan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap kesetaraan gender. Seperti Ujian Kompetensi yang dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan, seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi Ujian Kompetensi, maupun soal yang disajikan dalam Ujian Kompetensi.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Menerbitkan Nota Dinas kepada seluruh pegawai perihal Penugasan Akses Modul E-learning mengenai kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural serta menerapkannya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
- Melakukan monitoring berkala capaian jmlat pegawai.
- Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan kebintalan di setiap triwulan dengan memilih bidang yang diperlukan pada triwulan tersebut (ideologi, rohani, kompetensi, kejiwaan).
- Melaporkan kegiatan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

**18. Indeks Penilaian Integritas Unit (09b-N)**

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85%	85%	85,00%	85,00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	96,67%	96,67%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	113,73%	113,73%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit = ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) -

## Faktor Koreksi

### d. Realisasi IKU

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,89	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,89
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,67	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,73
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82

Sumber : Dashboard Mandor DJP

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 96.67 dari target sebesar 85.00 dengan capaian sebesar 113.37.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	118.25	111.46	111.06	113.73

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 tercapai sebesar 113.73 dan naik dari tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	96.67

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024

Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	96.67
----------------------------------	----	---	-------

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini sehingga telah mencapai target. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

- Memberikan pelayanan secara maksimal kepada Wajib Pajak dan menyampaikan bahwa seluruh layanan yang dilaksanakan tidak dipungut biaya.
- Membuat deklarasi benturan kepentingan untuk mencegah adanya benturan kepentingan antara pegawai dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.
- Menyampaikan list WP yang akan disurvei sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.
- Upaya yang dilakukan ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan SPI KPP Pratama Medan Barat.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan adalah menugaskan pegawai untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan SPI baik dalam hal penyampaian daftar Wajib Pajak, maupun memastikan Wajib Pajak yang terdata untuk dikirimkan link survey telah melakukan pengisian surveynya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sehubungan dengan belum diterimanya detail realisasi atas IKU ini, terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi, yaitu Wajib Pajak yang memang dalam pengisian survey memberikan nilai yang tidak sempurna, atau Wajib Pajak keliru dalam mengisikan survey.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja  
Untuk IKU ini adalah risiko atas Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum dan Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi dengan melakukan rencana aksi Sosialisasi Internalisasi mengenai Penguatan Integritas bagi Pegawai, internalisasi Nilai Integritas melalui Kegiatan Jadwal Doa Pagi dan Pembacaan Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, In House Training tentang Kode Etik dan Kode Perilaku, Pengawasan Pelaksanaan Perluasan Pakta Integritas, Melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) secara berkala, Melakukan Rapat Pembinaan mengenai Peningkatan Disiplin Pegawai, dan Melakukan Sosialisasi kode etik dan kode perilaku.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengisian survey. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah selalu memonitoring Wajib Pajak untuk mengisikan survey tersebut.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.  
IKU ini dilaksanakan dengan mengutamakan kesetaraan gender. Penyebaran Wajib Pajak targeted survey SPI diambil secara random tanpa membedakan gender bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Direktur atau Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.  
IKU ini memiliki kontribusi terhadap penyetaraan pemberian layanan tanpa membedakan Wajib Pajak. Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dipungut biaya/imbalan.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Memberikan pelayanan secara maksimal kepada Wajib Pajak dan menyampaikan bahwa seluruh layanan yang dilaksanakan tidak dipungut biaya.
- Membuat deklarasi benturan kepentingan untuk mencegah adanya benturan kepentingan antara pegawai dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.

- Menyampaikan list WP yang akan disurvei sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (09c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90%
Realisasi	28,00	74,67%	74,67%	84,77%	84,77%	99,74%	99,74%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,82%	110,82%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

- Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari

struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor

Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko

Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Administrasi dan Pelaporan
  1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
  2. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
  3. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
  4. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
  5. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.
- Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi

risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK- 105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,89	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,89
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,67	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,73
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82

Sumber : Dashboard Mandor DJP

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 99.74 dari 90.00 dengan capaian sebesar 110.82.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	110.43%	111.09%	109.44%	111.00%	110.82%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko selama 5 tahun terakhir selalu meraih indeks capaian hijau diatas 100%.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

	Dokumen Perencanaan	Kinerja
--	---------------------	---------

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	85	99.74

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko disebabkan karena pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko yang baik oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh pegawai juga menjadi alasan tercapainya iku ini karena implementasi manajemen kinerja merupakan bentuk optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan manajemen risiko merupakan alat yang memonitoring pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja.

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	99.74

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini berkat keberhasilan, kekompakan, dan koordinasi yang baik antar seluruh pegawai, dan juga perangkat manajemen kinerja dan risiko dalam pelaksanaan kegiatannya selama 2024 dinilai efektif.

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

- Melakukan koordinasi dengan setiap PIC Kinerja Organisasi di masing-masing seksi terkait.
- Perencanaan Pelaksanaan DKO (paling lama tanggal 10) dan persiapan bahan DKO dengan tepat waktu dan efektif (melakukan permintaan data NKO sebelum Triwulan berakhir melalui Nota Dinas dan komunikasi langsung).
- Menyusun piagam MR dan menyampaikannya tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
- Mempersiapkan bahan rapat pemantauan mitigasi risiko yang terintegrasi dengan DKO.
- Melakukan adendum piagam MR untuk menyesuaikan rencana aksi dengan kegiatan rutin KPP.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang tepat waktu setiap triwulannya.
- Upaya yang dilakukan ialah terus mempertahankan budaya pelaksanaan tepat waktu tersebut untuk maksimalkan skor yang menjadi dasar penilaian dalam IKU ini.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan adalah pegawai yang menjadi PIC pelaksanaan manajemen organisasi dan mitigasi risiko berkoordinasi setiap triwulannya untuk menyampaikan laporan yang akurat dan tepat waktu.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan melakukan dialog kinerja organisasi dan risiko sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan penyampaian laporan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah pelaksanaan rapat dialog kinerja dan risiko organisasi yang membutuhkan dokumen pendukung yang cukup banyak sehingga pelaksanaan rapat harus dilakukan minimal seminggu sebelum jatuh tempo waktu pelaporan pelaksanaan dialog kinerja dan risiko organisasi.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi Good Governance yang menjunjung tinggi integritas serta sinergi yang baik khususnya dalam hal pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Melakukan koordinasi dengan setiap PIC Kinerja Organisasi di masing-masing seksi terkait.
- Perencanaan Pelaksanaan DKO (paling lama tanggal 10) dan persiapan bahan DKO dengan tepat waktu dan efektif (melakukan permintaan data NKO sebelum Triwulan berakhir melalui Nota Dinas dan komunikasi langsung).
- Menyusun piagam MR dan menyampaikannya tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
- Mempersiapkan bahan rapat pemantauan mitigasi risiko yang terintegrasi dengan DKO.
- Melakukan adendum piagam MR untuk menyesuaikan rencana aksi dengan kegiatan rutin KPP.

**20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)**

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,00%	91,00%
Realisasi	120,00	104,97%	104,97%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Barat

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d Triwulan III =  $100\% \times \text{IKPA}$  dengan nilai IKPA 95,5%

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100).

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	123	015	119677	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					

Sumber : OMSPAN

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120.00 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	98.02%	102.45%	97.04%	105.28%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 1 (satu) tahun sebelumnya mencapai target 3 (tiga) kali dalam 5 tahun terakhir.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	95.5	100.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	-	100.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Barat

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah menyelesaikan revisi anggaran, mereviu rencana penarikan dana pada Hal.III DIPA, menginventarisir pekerjaan kontraktual, melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, dan percepatan pembayaran sesuai prestasi kerja.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.
- Upaya yang dilakukan ialah terus mempertahankan sinergi yang telah terbangun sangat baik dalam tim keuangan.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan koordinasi yang antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK secara penuh sehingga seluruh kegiatan keuangan/anggaran dalam terlaksana sesuai dengan amanah penggunaan DIPA.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan seperti salah satu yang paling rawan adalah realisasi perencanaan RPD setiap triwulan, yang dilaksanakan

agar sesuai dengan penetapan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan perencanaan belanja yang baik di awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan skor yang didapat menjadi tinggi (selisih deviasi kecil antara perencanaan belanja dan realisasi belanja).

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Untuk IKU ini menganalisis risiko atas Pelaksanaan anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan rencana aksi Melaksanakan monitoring kinerja anggaran bersama tim keuangan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan belanja agar selisih deviasi pada RPD tidak terlalu jauh, melakukan pengisian capaian output rutin di awal bulan, serta melaksanakan kegiatan administrasi keuangan seperti penyampaian LPJ, pengelolaan TUP, dan lainnya tepat waktu.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan DIPA yang tidak berlebihan dengan memanfaatkan yang telah diberikan.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, yaitu menyelesaikan revisi anggaran, mereviu rencana penarikan dana pada Hal.III DIPA, menginventarisir pekerjaan kontraktual, melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, dan percepatan pembayaran sesuai prestasi kerja.

## B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN PAJAK 04  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT 119677

Tgl Data : 29/01/25 8:55 AM  
Tgl Cetak : 30/01/25 1:45 PM  
Halaman : 1  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	2,519,033,296,000	2,087,751,836,218	(431,281,459,782)	83	1,866,517,335,000	1,949,556,456,955	(83,039,121,955)	104
1. Pajak Dalam Negeri	2,519,033,296,000	2,087,751,836,218	(431,281,459,782)	83	1,866,517,335,000	1,949,556,456,955	(83,039,121,955)	104
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	209,985,000	13,525,000	(196,460,000)	6	0	5,129,000	(5,129,000)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	209,985,000	13,525,000	(196,460,000)	6	0	5,129,000	(5,129,000)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,519,243,281,000	2,087,765,361,218	(431,477,919,782)	83	1,866,517,335,000	1,949,561,585,955	(83,044,250,955)	104
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,484,701,000	8,403,715,278	(80,985,722)	99	8,828,058,000	8,506,746,805	321,311,195	96
1. Belanja Pegawai	913,160,000	913,014,000	(146,000)	100	1,073,986,000	1,060,531,000	13,455,000	99
2. Belanja Barang	7,531,847,000	7,451,014,278	(80,832,722)	99	7,671,952,000	7,365,710,805	306,241,195	96
3. Belanja Modal	39,694,000	39,687,000	(7,000)	100	82,120,000	80,505,000	1,615,000	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN PAJAK 04  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT 119677

Tgl Data : 29/01/25 8:55 AM  
Tgl Cetak : 30/01/25 1:45 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,484,701,000	8,403,715,278	(80,985,722)	99	8,828,058,000	8,506,746,805	321,311,195	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :  
FINAL

MEDAN, 30 Januari 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

ADIANTO LEGOWO  
NIP. 197402032002121001

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran KPP Pratama Medan Barat sampai dengan Bulan Desember 2024

### **C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

KPP Pratama Medan Barat secara berkelanjutan melakukan efisiensi sumber daya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dan seluruh Pegawai. Pengumpulan saran/pendapat secara berkala yang dilakukan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal melalui link survei kepada seluruh pegawai merupakan salah satu cara untuk melakukan efisiensi di KPP Pratama Medan Barat. Melalui link survei tersebut, seluruh pegawai dapat memberikan rekomendasi perbaikan organisasi, sarana dan prasarana, teknologi informasi, maupun sumber daya manusia. Sebagai contoh, efisiensi di KPP Pratama Medan Barat dapat dilihat dari perbaikan tempat layanan terpadu di KPP Pratama Medan Barat, perbaikan jaringan yang mempermudah kinerja Seksi Penjamin Kualitas Data, penempatan pegawai dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, pengelolaan anggaran yang baik sehingga menerima penghargaan kinerja terbaik kedua pengelolaan kinerja APBN di Lingkungan Satker Mitra Kerja KPP Medan II, penyederhanaan proses bisnis pada saat pemberian layanan ke Wajib Pajak (Contoh: pemindahbukuan, permohonan PKP, pemindahan Wajib Pajak, dan lain-lain).

### **D. KINERJA LAIN-LAIN**

KPP Pratama Medan Barat meraih Peringkat Kedua Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Tahun 2024 yang dinyatakan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor KEP-177/WPJ.01/2024 tentang Penetapan Pemenang Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I tanggal 25 September 2024. KPP Pratama Medan Barat juga meraih Peringkat Kedua pada Semester I Tahun 2024 untuk kategori Kinerja Terbaik Penilaian Pengelolaan Kinerja APBN (IKPA) di Lingkungan Satker Mitra Kerja KPPN Medan II BA BUN dengan Nilai 99,72.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Medan Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas KPP Pratama Medan Barat tahun 2024 dilaksanakan dalam 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja utama (IKU) yang telah dilaksanakan dengan baik, dimana semua indeks capaian hijau. KPP Pratama Medan Barat meraih capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 110,13%. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,02% dari NKO tahun 2023 yang meraih nilai 107,11%. Nilai 110,13% disokong oleh 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 31,16%, *Customer Perspective* dengan indeks capaian 20,36%, *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 29,38%, dan *Learning & Growth Perspective* dengan indeks capaian 29,23%.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah/hambatan di masa yang akan datang perlu dilakukan penetapan strategi sebagai berikut.

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi semua unit/seksi pada KPP Pratama Medan Barat serta unit dan instansi lainnya di lingkungan DJP maupun luar DJP.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan prima.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal kompetensi pelaksanaan tugas dan integritas moral.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran.
- e. Melaksanakan tugas dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan *core values* ASN Ber-AKHLAK.
- f. Melakukan monitoring kinerja secara berkala dan mengeksekusi usulan perbaikan hasil monitoring secepatnya.

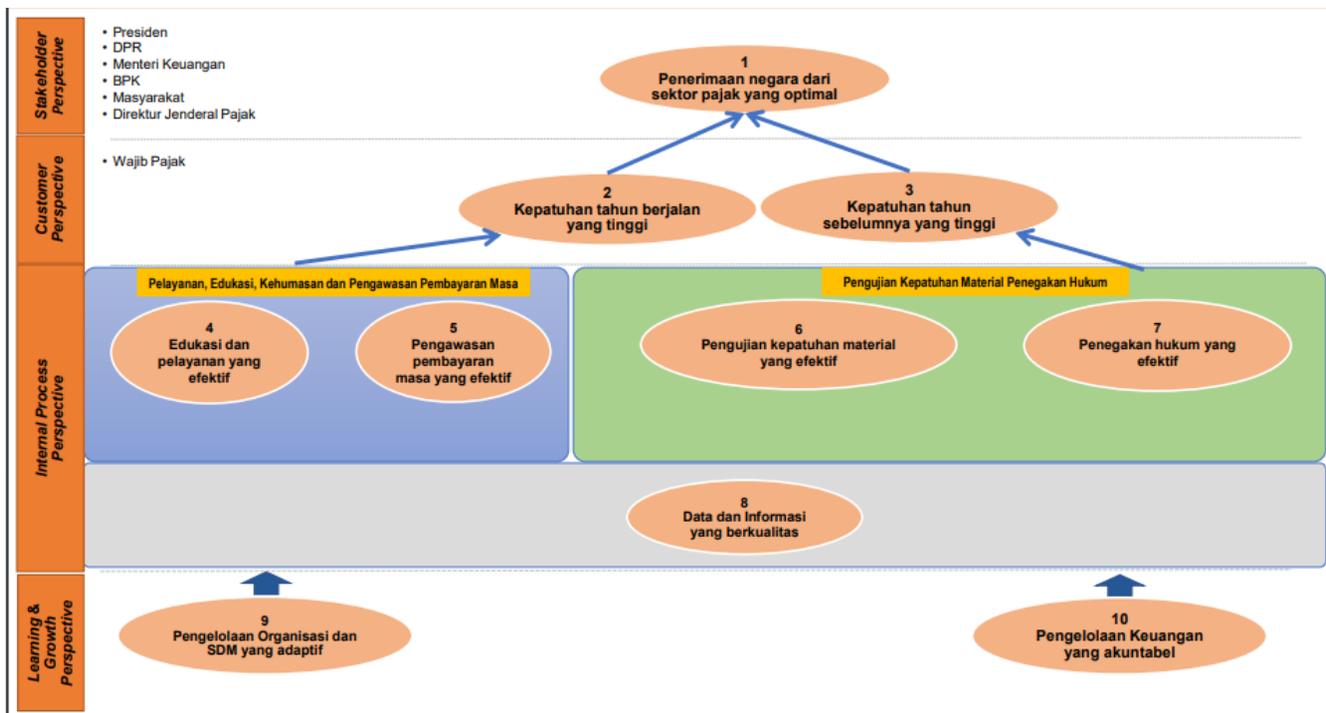
Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Medan Barat selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-3/WPJ.01/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN**  
**BARAT**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA UTARA I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.068.475.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 517.264.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 209.800.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 341.411.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 7.289.978.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.337.618.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 952.360.000
<b>Total</b>	<b>Rp 8.358.453.000</b>

Medan, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arridel Mindra



Ditandatangani Secara Elektronik  
Anto Sibarani



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Medan, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Medan Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Anto Sibarani



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melaksanakan sosialisasi, kelas pajak, dan penyuluhan perpajakan baik secara tatap muka dan <i>online</i>	Kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran sehingga menghasilkan perubahan perilaku pada WP menjadi taat	Q1: Sosialisasi Pengisian bukti potong bendahara pemerintah, kelas pajak <i>e-filing</i>	Q1: Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (1721 A2/ A1, 1770, 1770 S/SS dan 1771)	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	209.800.000
				Q2: Penyuluhan kewajiban pajak baru	Q2: Peningkatan keterampilan perpajakan			
				Q3: Penyuluhan kewajiban pajak baru	Q3: Peningkatan keterampilan perpajakan			
				Q4: <i>Tax Goes to School</i> dan <i>Campus</i>	Q4: Peningkatan kesadaran perpajakan			
2	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Melaksanakan sosialisasi, kelas pajak, dan penyuluhan perpajakan baik secara tatap muka dan <i>online</i>	Kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran sehingga menghasilkan perubahan perilaku pada WP menjadi taat	Q1: Sosialisasi Pengisian bukti potong bendahara pemerintah, kelas pajak <i>e-filing</i>	Q1: Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (1721 A2/ A1, 1770, 1770 S/SS dan 1771)	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	209.800.000
				Q2: Penyuluhan kewajiban pajak baru	Q2: Peningkatan keterampilan perpajakan			



				Q3: Penyuluhan kewajiban pajak baru	Q3: Peningkatan keterampilan perpajakan			
				Q4: <i>Tax Goes to School</i> dan <i>Campus</i>	Q4: Peningkatan kesadaran perpajakan			
3	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan tindak lanjut atas <i>data matching</i> , menerbitkan nota hitung dan lembar hitung STP	SP2DK, Laporan Hasil Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, tindak lanjut atas <i>data matching</i> , Nota Penghitungan (Nothit) STP dan STP.	Q1-Q4: Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan STP	Q1-Q4: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	517.264.000
4	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Mengoptimalkan setiap proses kegiatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan menindaklanjuti Daftar Prioritas Pengawasan menjadi Laporan Hasil Penelitian, SP2DK, dan LHP2DK	Penerbitan LHPt, SP2DK, dan LHP2DK	Q1-Q4: Menginventarisir data internal dan eksternal, menganalisis data, dan melakukan visit.	Q1-Q4: LHPt, SP2DK, dan LHP2DK	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	170.365.000



5	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Melakukan tindak lanjut data <i>matching</i> , dan menerbitkan nota hitung dan lembar hitung STP	Tindak lanjut atas <i>data matching</i> dan STP tahun pajak selain tahun berjalan	Q1-Q4: Melakukan tindak lanjut data pemicu dan penerbitan STP	Q1-Q4: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	517.264.000
6	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Komite Kepatuhan Wajib Pajak merumuskan rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan yang telah dilaksanakan	Rencana aksi/kegiatan dan laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan	Q1-Q4: Komite Kepatuhan Wajib Pajak merumuskan rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan yang telah dilaksanakan	Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang efektif	Januari-Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	517.264.000
7	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Melakukan tindak lanjut atas Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dengan memperhatikan potensi penerimaan pajak, serta monitoring berkala atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan.	DSPP dan DSPPn, LHP, dan SKP	Q1-Q4: Melakukan tindak lanjut atas Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dengan memperhatikan potensi penerimaan pajak, serta monitoring berkala atas penyelesaian tunggakan pemeriksaan.	Q1-Q4: Kegiatan Pemeriksaan dan Penilaian yang efektif berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	101.250.000



8	Tingkat efektivitas penagihan	Melaksanakan seluruh tahapan penagihan aktif terhadap penunggak pajak, melakukan pengawasan terhadap kemampuan bayar penunggak pajak, dan menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)	Dokumen Penagihan, Berita Acara Penagihan, Tindak Lanjut atas DSPC	Q1-Q4: Melaksanakan seluruh tahapan penagihan aktif terhadap penunggak pajak, melakukan pengawasan terhadap kemampuan bayar penunggak pajak, dan menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)	Q1-Q4: Tindakan penagihan yang efektif yang diukur dari variabel tindakan penagihan dan persentase pencairan tunggakan wajib pajak	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	69.796.000
9	Persentase penyampaian usul pemeriksaan Bukti Permulaan	Meningkatkan penggalan potensi melalui bedah WP, pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP, sampai tahap rekomendasi pemeriksaan bukti permulaan pada simpulan LHP2DK	LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan bukti permulaan	Q1-Q4: Melakukan bedah WP sampai tahap rekomendasi pemeriksaan bukti permulaan pada simpulan LHP2DK	Q1-Q4: Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam Komite Kepatuhan	170.365.000



10	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan Kegiatan Pengamatan dan Data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L)	Q1-Q4: Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan Kegiatan Pengamatan dan Data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L)	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	380.502.000
11	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Melakukan pengawasan dan penghimpunan data regional yang diperoleh dari ILAP dengan berkoordinasi dengan Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan di Kanwil DJP Sumut I.	Himpunan data regional dari ILAP	Q1-Q4: Melakukan pengawasan dan penghimpunan data regional yang diperoleh dari ILAP dengan berkoordinasi dengan Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan di Kanwil DJP Sumut I.	Q1-Q4: Himpunan data regional dari ILAP mencapai target yang telah ditentukan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	0



12	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Melakukan <i>transfer knowledge</i> melalui IHT yang terjadwal baik IHT tatap muka maupun IHT <i>e-learning</i> dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, serta melaksanakan kegiatan kebintalan SDM	Terpenuhinya standar kompetensi pegawai di lingkungan kantor dan terlaksananya kegiatan kebintalan SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Q1-Q4: Melaksanakan kegiatan IHT dan kebintalan secara terjadwal, serta menyusun jadwal <i>e-learning</i> untuk setiap pegawai	Q1-Q4: Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Medan Barat mencapai standar kompetensi yang diharapkan dan kegiatan kebintalan SDM terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	952.360.000
----	---	--	---	--	---	-----------------------	---------------------------------------	-------------



13	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA secara rutin, dan melaksanakan kegiatan pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Integritas kantor terpelihara dengan baik	Q1-Q4: Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA secara rutin sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan tahun 2024, melaksanakan kegiatan pelayanan perpajakan sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan tata cara penagihan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan	Q1-Q4: Integritas kantor terpelihara dengan baik, rencana pemantauan Tahunan terlaksana dengan baik, indeks pelayanan perpajakan yang optimal, indeks pengawasan kepatuhan tercapai, indeks penagihan pajak yang optimal, indeks pemeriksaan pajak yang optimal	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	952.360.000
14	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Melaksanakan manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan variabel penghitungan indeks efektivitas	Pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang efektif	Q1-Q4: Melaksanakan manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Q1-Q4: Pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang efektif	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	952.360.000



15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Pengawasan penggunaan anggaran	Terciptanya penggunaan anggaran yang tepat guna, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Q1: Melakukan penyusunan RUP	Q1: RUP pada akun LKPP	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	6.337.618.000
				Q2-Q4: Laporan Anggaran	Q2-Q4: Laporan Anggaran			

Medan, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Anto Sibarani



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 21 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Adianto Legowo	NAMA	Arridel Mindra	
NIP	197402032002121001	NIP	197008241991031005	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis



	Sumatera Utara I)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

#### B. TAMBAHAN

#### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan
---	------------------------



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA

5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Pegawai yang Dinilai,

21 Februari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik  
Adianto Legowo  
197402032002121001

Ditandatangani secara elektronik  
Arridel Mindra  
197008241991031005

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 21 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	113 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						Y
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100	



3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%



14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	<b>Persentase penghimpunan data regional dari ILAP</b>	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

#### KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawa



21 Februari 2024  
Pejabat F



Ditandatangani secara elektronik  
Adianto Legowo  
197402032002121001

Ditandatangani secara elektronik  
Arridel Mindra  
197008241991031005

